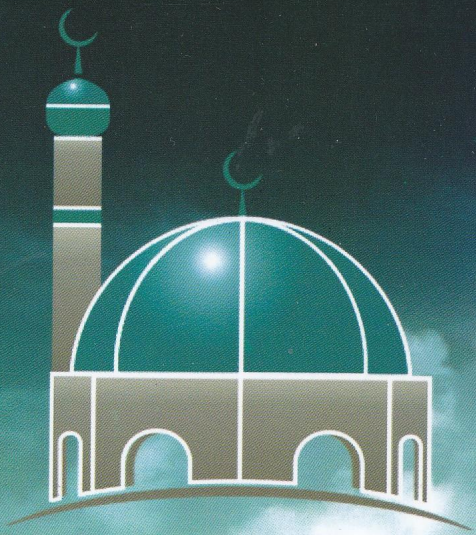

Revitalisasi Fungsi

MASJID

Melalui

POSDAYA

dalam Prespektif Teori Strukturasi

Mufidah Cholil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أُولُو الْأَلْبَابِ
MALANG

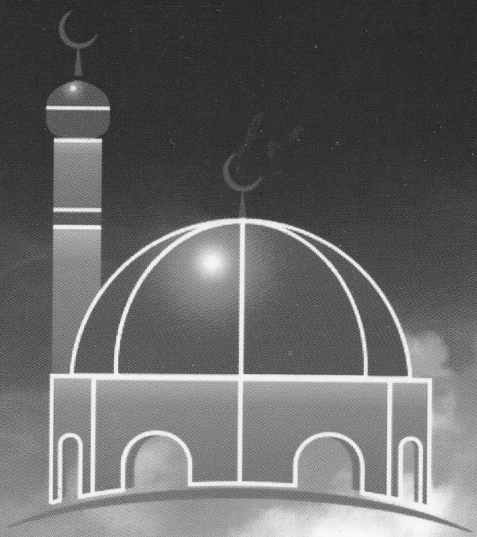

Revitalisasi Fungsi

MASJID

Melalui

POSDAYA

dalam Prespektif Teori Strukturasi

Mufidah Cholil

JUDUL
Revitalisasi Fungsi Masjid melalui POSDAYA
dalam Perspektif Teori Strukturasi

PENULIS
Mufidah Cholil

PENERBIT
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang - Jawa Timur - INDONESIA

EDISI
Cetakan # 1 | November 2015

BY NC ND

Kata Pengantar

Problem di seputar interelasi antara masjid dengan masyarakat, bahwa masjid sebagai pusat pemberdayaan umat telah dipahami oleh sebagaian besar umat Islam, namun dalam implementasinya masih mengalami tarik ulur antara masjid sebagai medan ritual dengan tugas pemberdayaan umat sebagai medan budaya di luar peran masjid. Kondisi saat ini, mayoritas masjid masih kehilangan peran, fungsi dan kebermaknaannya dalam mengantarkan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Masjid masih dikonsepkan sebagai ruang ritual bagi mereka yang ingin meraih kesucian hanya dengan ibadah murni, padahal sejalan dengan itu peran dan tanggung jawab sosial sebagai ibadah kemanusiaan merupakan sisi lain yang memiliki nilai yang setara. Untuk itu diperlukan revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Masjid menyimpan potensi tidak hanya berfungsi menggerakkan umat untuk beribadah khusus, tetapi juga memakmurkan masjid dengan cara memberdayakan umat. Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang merupakan salah satu

strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan semua komponen masyarakat dengan sasaran seluruh anggota keluarga dengan indikator capaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan akan dilanjutkan dengan SDGs, artinya hasil kegiatan posdaya ini dapat diukur dengan ukuran nasional maupun global.

Sejak tahun 2011 LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencanangkan program "Pengabdian Masyarakat Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Masjid" bekerjasama dengan Yayasan Dana Sejahtara Mandiri (Damandiri) Dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI). Program ini sebagai bentuk inovasi model pemberdayaan masyarakat yang mengambil sasaran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat namun memiliki akses dan dampak yang sangat luas di dalam kehidupan. Masjid merupakan sentra aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang memiliki multifungsi dan sarana mengembangkan modal sosial tidak hanya lingkup ibadah dalam arti khusus, tetapi juga aktivitas ibadah luas untuk pembangunan nasional maupun daerah sebagai bentuk *da'wah bil hal*. Sinergitas antara peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dengan fungsi-fungsi keluarga yang harus dijalankan, serta ditopang oleh kehadiran dosen dan mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat dapat mempercepat tercapaianya kehidupan masyarakat yang berdaya, sejahtera dan mandiri.

Buku yang berada di tangan pembaca ini mencoba mengkritisi konsep dan implementasi posdaya berbasis masjid dalam perspektif teori sosial Strukturasi dan dampak perubahan di masyarakat. Masjid dan jama'ahnya merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat, posdaya berbasis masjid tidak membiarkan jama'ahnya tertinggal dari yang lain, seluruh jama'ah

kader posdaya memiliki kontribusi dalam berbagai bentuknya sesuai dengan potensi dan kompetensinya masing-masing.

Selaku Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dukungan kebijakan dan pengarahan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Berbasis Masjid.
2. Prof. Dr. Haryono Suyono, selaku Ketua Umum Yayasan Damandiri yang telah memberikan dukungan konsep posdaya yang dapat dikembangkan melalui masjid.
3. Ketua dan Pengurus PP-DMI, PW-DMI Jawa Timur dan PD-DMI Kabupaten/Kota, mitra pengabdian yang memiliki komitmen dalam mendukung program ini.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku pembina Masjid.
5. Para Takmir Masjid dan pengurus Posdaya Berbasis Masjid mitra kerja LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Para Pimpinan Fakultas, dosen, mahasiswa, relawan dan semua pihak yang turut mendukung progam ini.

Semoga Allah Swt senantiasa membalas budi baik bapak, ibu dan saudara. *Jazakumullah khaira jaza'. Amin ya mujiba sailin.*

Malang, November 2015
Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim

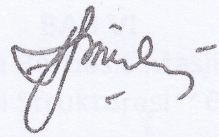

Dr. Hj. Mufidah Ch, M Ag.

PENGUKUHAN GURU BESAR
Mufidah Ch., M.Ag
WAKIL REKTOR I

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ vii

BAB I
Pendahuluan ~ 1

BAB II
Pemberdayaan Masyarakat ~ 9

BAB III
Revitalisasi Fungsi Masjid ~ 25

BAB IV
Posdaya Berbasis Masjid sebagai Strategi Pemberdayaan Umat ~ 35

BAB V
Perspektif Teori Strukturasi dalam Pemberdayaan Masyarakat ~ 57

BAB VI
Sistem Posdaya Berbasis Masjid Perspektif Teori Strukturasi ~ 63

BAB VII
Dampak KKM Tematik Posdaya
Berbasis Masjid Perspektif Teori Strukturasi ~ 69

BAB VIII
Penutup ~ 71

Daftar Pustaka ~ 75

Bab I
PENDAHULUAN

Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla ketika memberikan materi pada acara Launching Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012 mengungkapkan bahwa perbandingan jumlah masjid dan umat muslim masih terlalu sedikit. Sebab, setiap 700 orang umat muslim hanya satu masjid. Sedangkan bagi umat Kristen, setiap 274 orang tersedia satu gereja. Bagi umat Katholik, setiap 600 orang memiliki satu rumah ibadah. Untuk umat Hindu, setiap 161 orang memiliki satu Pura. Setiap 700 umat Budha memiliki satu Vihara. Namun demikian ia menegaskan bahwa umat Islam harus memakmurkan masjid bukan hanya di bidang ibadah tetapi juga dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Jumlah masjid di Indonesia merupakan terbesar di dunia, karenanya sangat potensial bila dioptimalkan fungsinya.[1].

Kementerian Agama Republik Indonesia menemukan gejala semakin surutnya pemanfaatan masjid untuk kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk shalat berjamaah. Hasil riset Kemenag ini menunjukkan, 89,9% dari 800 ribuan masjid se

1 Jusuf Kalla: *Perbandingan Jumlah Masjid dan Umat Islam Masih Sedikit,* www.dakwatuna.com. Diakses 19 Maret 2015.

Indonesia saat ini sepi dari kegiatan keagamaan. Direktur Pemberdayaan Zakat Kemenag Pusat Rohadi Abdul Fattah saat meluncurkan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji mengatakan bahwa "Saat ini masyarakat muslim, terutama anak-anak muda, lebih suka berjamaah di mall-mall daripada shalat berjamaah di masjid".[2]

Sebuah kenyataan bahwa kehidupan religius masyarakat muslim di Indonesia dapat diperhatikan pada eksistensi masjid yang sebagian besar bertumpu pada aktifitas peribadahan dan sosial keagamaan. Masjid merupakan simbol yang memunculkan identitas komunal sebagai pengikat kehidupan kolektif masyarakat di sekitarnya yang diapresiasi ke dalam varian hubungan jamaah dengan beragam kegiatan keagamaan. Hal ini menandai bahwa hubungan sosial umat Islam bermetamorfosis di dalam masjid. Fungsi dan masjid merupakan miniatur pengembangan nilai-nilai *uluhiyah* dan *insaniyah.* Namun, hari ini hanya masjid-masjid tertentu saja yang mengembangkan fungsi dan peran tersebut.

Dalam perspektif historis, masjid tidak dapat dipisahkan dengan awal mula Islam disebarluaskan. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba', kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah[3]. Kedua masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan, dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi untuk mengantarkan umat Islam menjadi orang-orang yang bertaqwa. "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah.

2 Hasil Riset *89 Persen Masjid Sepi,* www.bersamadakwah.com. Diakses 20 Maret 2015.

3 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 461.

Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk"[4]. Ekspresi ketaqwaan yang dimaksud sangat luas dan beragam sejalan dengan tugas kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan demikian masjid menjadi pusat bergeraknya tugas kekhalifahan setiap umat Islam dalam kehidupan dengan landasan taqwa.

Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya yang beraneka ragam. Sekurang-kurangnya terdapat sembilan peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, pusat pendidikan dan dakwah, tempat pengadilan, tempat penyambutan utusan, pemberdayaan umat, tempat Rasulullah menyambut delegasi atau tamu negara dan tokoh agama lain, tempat melangsungkan akad nikah, dan tempat mengatur strategi perang.

Fungsi masjid dikaitkan dengan implementasi ajaran Islam meliputi fungsi *imaniyah* mendekatkan diri kepada Allah dengan berteologi yang benar, fungsi *ubudiyah* menjalankan ritual sesuai aturan agama, fungsi *mu'amalah* memberdayakan umat dalam berbagai aspek kehidupan, fungsi *adab mu'asyarah* bersosialisasi dan kerjasama yang harmonis dalam kehidupan, dan fungsi akhlaq atau berperilaku yang baik untuk membangun peradaban.[5]

Ketika sebagian besar masjid di Indonesia kini bergeser dari peran-peran historis dalam konteks perubahan sosial kemasyarakatan menuju bentuk penyelenggara kegiatan ibadah murni berupa shalat lima waktu, maka terjadi pengerdilan peran-peran sosial masjid. Jumlah masjid di Indonesia diperkirakan mencapai 800.000, Jumlah masjid seluruh Indonesia yang di

4 Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 18.

5 Ahmad Sarwono, *Masjid Jantung Masyarakat*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka. 2003), hlm. 4-5

bawah jaringan Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia-Nahdlatul Ulama' (LTMI-NU) hingga sekarang mencapai 125.000 masjid, namun hanya ada beberapa masjid yang telah memfungsikan masjid sebagai pemberdaya umat. Beberapa masjid dimaksud telah memprakarsai upaya-upaya membangun sinergi dengan masyarakat dalam memberdayakan potensi lokal yang ada. Pada perkembangannya, masjid lebih berfokus semata-mata sebagai penyelenggara ritual keagamaan. Padahal masjid memiliki posisi sentral dalam menggerakkan masyarakat dalam isu-isu yang terkait dengan pembangunan bangsa.

Dalam konteks masyarakat muslim kekinian, terlihat adanya "keterasingan dan pereduksian" akan eksistensialitas dan fungsionalitas masjid, baik dari masjid kepada masyarakatnya, maupun dari masyarakat terhadap masjidnya. Keterasingan masjid dari masyarakatnya terlihat misalnya dari sisi kuantitas kunjungan shalat lima waktu berjamaah, menunjukkan jumlah yang sangat memprihatinkan bila dibanding dengan jumlah muslim yang ada disekitarnya, atau aktivitas masjid yang sangat monoton dalam pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan aktivitas keagamaan lainnya. Demikian pula dari sisi kualitas akan aktivitas yang dilakukan di masjid oleh jama'ahnya, terlihat ada kesenjangan perilaku yang dibicarakan di masjid dengan dinamika faktual di luar masjid oleh masyarakatnya[6]

Sejumlah masjid disebut mengalami krisis jika masjid tidak lagi berfungsi sebagaimana masjid di era Rasulullah. Krisis masjid ini berdampak pada krisis masyarakat muslim. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah yang bersifat kudus, tetap, sakral dan berorientasi akhirat, tetapi juga merupakan pusat

6 Amril Mansur, *Masjid dan Transformasi Sosial Etis:Upaya Pemberdayaan Masjid dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Innovation, Vol. IX, No. 1, Januari-Juni 2010 , hlm. 145-146.

kebudayaan yang bersifat dinamis, profan dan berorientasi keduniawian. Mempertemukan dua fungsi masjid tersebut dapat menghindarkan krisis masjid sekaligus krisis yang dialami oleh masyarakat muslim.[7]

Kuntowijoyo (2001), mengekpresikan keprihatinannya dalam bukunya "Muslim Tanpa Masjid"[8]. Ia mengkritisi pandangan bahwa masjid dianggap penghambat kemajuan pembangunan. Generasi muda muslim lebih suka mengidentikkan dirinya dengan masjid dan umat. Diperlukan integrasi substantif yang mempertemukan antara ilmu keislaman dengan ilmu sosial budaya dan lainnya. Di satu sisi umat membutuhkan masjid untuk mengekspresikan citarasa keagamaan (*taste of religious*), di lain sisi masjid membutuhkan umat untuk memakmurkannya, sehingga terwujud simbiose mutualistik[9]

Pada *term* ini maksimalisasi fungsi masjid menjadi harapan umat, kredibilitas masjid hingga saat ini masih memiliki *trust* sebagai lembaga sentral bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Masjid juga sebagai ruang budaya yang memberikan kenyamanan yang dijamin oleh undang-undang dari hiruk pikuknya politik praktis, dukung mendukung kepentingan politik tertentu. Dalam *term* ini masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi merupakan keniscayaan yang harus dilestarikan.

Karena itu masjid harus dipahami di samping sebagai medan *mujahadah* mendekatkan diri kepada Allah dalam konteks hubungan vertikal, masjid juga sebagai tempat ijtihad untuk

---

7 Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam,* (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1989), hlm. 319-320

8 Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 127.

9 A. Bachrun Rifa'i dan Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid,* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 97.

menggali ilmu pengetahuan, keterampilan, mengembangkan kreativitas dan profesionalisme untuk solusi umat terhadap problematikanya, dan masjid juga sebagai medan jihad melawan musuh umat dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, ketergantungan dan peminggiran. Jihad dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya menyejahterakan kelompok miskin termarjinal melalui masjid.[10]

Pengembangan manyarakat merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Tugas ini bersifat menyeluruh dan integratif antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat secara seimbang. Masjid sebagai pusat implementasi tugas kekhalifahan ini diperlukan cara-cara yang tepat dalam melakukan pemberdayaan umat agar memiliki dampak perubahan pada setiap jama'ah dan masyarakat serta lingkungan secara luas.

Dalam kajian ini penulis ingin mengemukakan masalah mengenai peran dan fungsi masjid yang menyimpan potensi tidak hanya menggerakkan umat untuk beribadah khusus, tetapi juga memakmurkan masjid dengan cara memberdayakan umat. Misalnya, program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan semua komponen masyarakat dengan sasaran seluruh anggota keluarga dengan indikator capaian *Millenium Development Goals* (MDGs), artinya hasil kegiatan posdaya ini dapat diukur dengan ukuran global.

10 Ahmad Sarwono, *Masjid Jantung Masyarakat,* (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003), hlm.185.

Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia (H. Jusuf Kalla), Ketua Umum Yayasan Damandiri (Prof. Haryono Suyono) dan Ketua LP2M UIN Malang Dr. Hj. Mufidah Ch, M Ag

LKK NU
Santun Menyejukkan
KISWAH INTERAKTIF
KELUARGA DAN KESETARAAN GENDER
Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M Ag.
Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Line Interaktif
031 5660109
Putri Chumairoh
Host
JUMAT, 30 OKTOBER 16.30 WIB LIVE
KINI TV9 NUSANTARA DAPAT DIAKSES LEBIH MUDAH, LEBIH LUAS MELALUI
42 UHF SURABAYA
SATELIT TELKOM 4 FREQ 3776 SYMRATE 1700 POL VERTIKAL
TRANSVISION
K-VISION
play
TV9 Nusantara
@tv9nusantara
LIVE You Tube TV9 Official

Bab II
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau pemecahan masalah-masalah yang sedang atau akan dihadapi, Demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut[11]. Dengan demikian karakteristik pembangunan adalah melalui proses terencana, *sustainable*, partisipatif, menyejahterakan, solusi atas problem masyarakat.

11 Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan Corporate Social Responsibility* (Surakarta: UNS Press, 2013), hlm. 8

Relawan Posdaya sedang memfasilitasi pelatihan Posdaya Masjid

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosil-budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh "orang luar" atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Pembangunan berbasis masyarakat, berarti pembangunan harus berbasis pada sumberdaya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau diyakini oleh masyarakat setempat.[12]

Pembangunan berbasis masyarakat memperhatikan upaya menggerakkan sumber daya lokal oleh masyarakat sendiri secara partisipatif. Modal sosial yang telah berkembang di masyarakat

12 Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat…. hlm. 3

yang memperkokoh jalinan komunikasi dan menperkuat komitmen *stakeholder* yang secara ajeg melakukan aktivitas untuk mencapai perubahan sosial yang diharapkan. Dalam membangun masyarakat juga tidak bisa mengabaikan budaya lokal yang dihormati oleh masyarakat setempat. Kegagalan program pembangunan masyarakat akibat tidak memahami dan menghargai budaya lokal. Demikian pula keberhasilan pembangunan masyarakat karena mampu mengintegrasikan pesan-pesan pembangunan melalui budaya lokal sehingga mudah mengubah *mindset* maupun perilaku masyarakat. Kearifan lokal merupakan sumber pengetahuan yang dinilai benar yang telah mengakar ditransformasikan secara turun temurun, diyakini memberikan manfaat dalam mewujudkan keteraturan masyarakat. Oleh karena itu kearifan lokal menjadi landasan kuat dalam menyadarkan, menggerakkan, dan mengubah masyarakat tanpa meninggalkan atau mencabut akar-akar kemaslahatan yang berkembang di masyarakat. Modal spiritual yang telah diyakini oleh masyarakat yang harus dihargai dan dihormati, sebab dengan cara memperhatikan modal spiritual, percepatan proses pembangunan masyarakat akan terwujud. Untuk lebih rinci dapat diperhatikan pada pembahasan berikut ini.

B. Komponen dan Basis Pembangunan Masyarakat

Menurut Jim Ife dan Frank Tesorieo (2006), bahwa disamping komponen pembangunan masyarakat yang mencakup komponen **sosial, ekonomi,** dan **politik**, pengembangan masyarakat juga memperhatikan komponen pengembangan masyarakat yaitu: pengembangan budaya, lingkungan, dan pengembangan personal/spiritual. Adapun pembangunan berbasis masyarakat menurut Totok Mardikanto (2014), mencakup: Pembangunan dari atas atau dari bawah, pembangunan berbasis sumberdaya

lokal, pembangunan berbasis modal sosial, pembangunan berbasis kebudayaan, pembangunan berbasis kearifan lokal, dan pembangunan berbasis modal spiritual.

1. Pengembangan Masyarakat Berbasis Budaya

Globalilasi budaya berkembang karena disebarluaskan melalui media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan kapitalis transnasional. Masyarakat semakin kesulitan dalam menghadapi budaya global yang tidak bisa dibendung. Budaya lokal telah berubah dari identitas masyarakat lokal menjadi komoditas yang diproduksi, dikemas, dijual belikan. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya mencakup melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan melestarikan budaya asli, multikulturalisme dan budaya partisipatori.

Posdaya Al-Amin Sumberpucung menggelar Kegiatan Rutin "Jagong Maton"

Pertama, pelestarian budaya lokal dimulai dari identifikasi komponen apa saja yang harus dilestarikan, yang unik dan signifikan untuk dipertahankan. Pelestarian budaya lokal tidak ada cara yang baku, tetapi merupakan inisiatif dari masyarakat

sendiri. Tradisi budaya lokal bersifat dinamis menjadi pusat untuk interaksi sosial, partisipasi, proses pengembangan masyarakat baik ekonomi dan politik;

Kedua, budaya asli/pribumi seringkali termarjinalkan dengan alasan pengembangan masyarakat. Pelestarian budaya asli sangat penting untuk menghalau penindasan, dominasi, kolonialisme, rasisme dan pemaksaan budaya asing dengan mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal; *Ketiga*, budaya multikultural telah menjadi norma di masyarakat. Semakin terbukanya interaksi sosial dan perpindahan penduduk yang berbaur antara warga asli dengan pendatang berakibat pada tumbuhnya budaya baru. Budaya yang beragam merupakan pengembangan sebagai pengalaman kultural. Keragaman budaya diarahkan sebagai kekuatan pembangunan, bukan sebagai sarana memicu ancaman, ketakutan, kecurigaan, ketegangan dan kekerasan budaya;

Keempat, budaya partisipatif telah membuka ruang budaya secara inklusif untuk dimasuki oleh semua lapisan masyarakat baik budaya tinggi atau budaya popular. Dalam pengembangan masyarakat diperlukan partisipasi dalam interaksi sosial yang produktif. Budaya partisipatif dapat mendorong warga masyarakat untuk bergotong royong, aksi sinergi, mengatasi masalah menggunakan format budaya tradisional, dan sebagai energi untuk menggerakkan percepatan pembangunan. Misalnya: olah raga, seni musik, game, bazar, pasar minggu, majlis taklim dan sebagainya.

2. Pengembangan Masyarakat Berbasis Lingkungan

Pengembangan masyarakat harus memperhatikan lingkungan. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan dapat terwujud situasi kondusif, interaksi sosial yang sehat, dan aktivitas masyarakat yang produktif dan efektif. Kebutuhan mendesak

setiap orang terhadap air bersih, makanan sehat, udara segar merupakan kebutuhan global. Gerakan pelestarian lingkungan telah menembus batas-batas lokal untuk melindungi ekosistem global. Kesalahan selama ini tentang konsep *green* adalah bahwa pelestarian lingkungan hanya dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dan kelas sosial menengah ke bawah. Padahal isu lingkungan juga terkait dengan keadilan sosial, kesejahtaraan dan hak-hak dasar manusia. Pembalakan liar dengan cara membakar hutan mengakibatkan asap yang menembus lintas negara, rusaknya ekosistem, menurunnya kesejahtaraan, tidak tercapaianya keadilan sosial, hak-hak asasi manusia terabaikan dan bahkan telah berubah menjadi teror massif di masyarakat. Karena itu semua manusia harus menjadi sahabat setia lingkungan dan alam.

Ketua LP2M UIN Malang Melihat Pemanfaatan Lingkungan Rumah untuk Ketahanan Pangan Keluarga

3. Pengembangan Masyarakat Berbasis Spiritual

Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat tidak dapat diabaikan. Rasa kesakralan dan penghormatan nilai-nilai spiritual merupakan bagian penting yang memberikan makna dan tujuan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki sifat dasar spiritual, perasaan yang manyatukan manusia, fauna,

flora dan alam ini dalam satu kesatuan. Berbagai pengalaman spiritual dan keberagamaan masyarakat harus dihormati. Tempat ibadah seperti masjid menyimpan energi spirit yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat secara partisipatif dan kerjasama kolaboratif.[13].

4. Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial

Modal sosial adalah bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang dilembagakan dalam bentuk hidup bersama, peran, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan yang sama.

Dari pengertian tersebut, modal sosial mencakup unsur-unsur antara lain: *Pertama*, adanya partisipasi warga masyarakat; *Kedua*, jejaring sosial setiap warga atas dasar sukarela; *Ketiga*, ada interrelasi antar individu dalam berjejaring, solidaritas, rasa saling percaya, gotong royong, saling menghargai; *Keempat*, ada identitas yang mengikat secara sosial dan emosional hingga muncul soliditas, setara antar individu di masyarakat. Modal sosial ini memberikan manfaat dalam mengembangkan masyarakat dalam penyadaran, pembagian kekuasaan, mengorganisir warga, memudahkan komunikasi, dan membentuk perilaku yang didasarkan pada kebersamaan dan soliditas yang kuat.[14]

---

13 Baca: Jim Ife Frank Tesoriero, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global,* Terjemah: Sastrawan Manullang dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.447-48

14 Baca: Totok Mardikanto, *Pemberdayaan*……. hlm. 77-86

Fatayat NU se-Jawa Timur Melakukan Observastion Study Tour di Posdaya Al-Amin Sumberpucung

C. Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Model pembangunan yang dikenal dalam sejumlah literatur ada tiga macam yaitu: Model *economic growth, basic needs,* dan *people centered.*

Pertama; *economic growth* yaitu model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yakni kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu misalnya per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja; Kedua, *Basic Needs***,** model pembangunan kebutuhan dasar/kesejateraan lahir dari prakarsa Gunnar Myrdall. Model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarkat miskin misalnya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dll; Ketiga, *People Centered***,** model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia,

persamaan dan *sustainable* sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan ekonomi atau pengadaan pelayanan sosial.

Dari ketiga model pembangunan ini, model yang ketiga dewasa ini menjadi pilihan dalam pemberdayaan masyarakat. *People Centered* merupakan pembangunan yang memperhatikan nilai-nilai sosial yang bersifat *participatory, empowering*, dan *sustainable*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme unuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.[15] . Karena itu pembangunan berbasis masyarakat menggunakan strategi "pemberdayaan" akan lebih tepat dalam mengubah kondisi oleh masyarakat sendiri.

Pemberdayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan", karena power bukan sekedar "daya" tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi juga "mempunyai kuasa".[16]. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. (Pranarka, 1996).[17]

---

15 Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*……hlm. 13

16 Andy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat,* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hlm. 1

17 Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*……hlm. 152.

Dari uraian di atas, maka pemberdayaan adalah:

1. Berpusat pada manusia dan kemanusiaan beserta nilai-nilai, norma-norma budaya yang dipedomani.
2. Memberikan akses atas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan
3. Memberikan kepercayaan, memampukan masyarakat untuk mandiri, lepas dari ketergantungan dalam merencanakan dan mengambil keputusan
4. Membangun daya, membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki
5. Memperkuat potensi dengan langkah-langkah konkrit yang dirumuskan secara partisipatif
6. Memampukan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, modal, teknologi, manajemen dan *skill* yang diperlukan serta penguatan pranata atau lembaga-lembaga sebagai wadahnya.
7. Memberdayakan juga bermakna melindungi yang lemah dalam menghadapi yang kuat tetapi masih dalam kesatuan interaksi sosial seperti mencegah persainaagn tidak sehat, hegemoni dan marjinalisasi kelompok lemah.

Pemberdayaan masyarakat diperlukan dasar-dasar pertimbangan dalam memahami konsep, menganalisis dan merancang program serta mekanismenya. Adapun dasar-dasar pemberdayaan masyarakat menurut Dubois dan Miley (1977) dalam Andy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi:

1. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit;*

2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan;
3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi;
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan;
5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif;
6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis sinergis, berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi;
7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.[18]

D. Pemberdayaan Keluarga untuk Pengentasan Kemiskinan

Implementasi pemberdayaan masyarakat pada umumnya digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Konsep pengentasan kemiskinan mencakup pemberian akses bagi kelompok miskin, pemberdayaan untuk bisa mandiri, meningkatkan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan akses merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan, sebab warga miskin pada umumnya tidak cukup kuat energinya untuk mambuka sendiri akses-akses yang diperlukan. Melalui perluasan kesempatan difokuskan menciptakan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, politik, dan sosial agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

18 Andy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*,..... hlm. 116.

Pemerintah mengklaim kemiskinan berhasil diturunkan dan angka pengangguran juga telah turun, namun sebagian besar dari masyarakat belum begitu saja yakin dengan angka-angka menyejukkan hati tersebut. Yang sangat jarang dimunculkan adalah adanya data kesenjangan dan jarang pula diketengahkan di publik[19]. Pertumbuhan ekonomi harus dicapai dengan cara memperluas pemeretaan. Kunci terpenting dalam pemerataan adalah bukan dengan proteksi ekonomi, melainkan dengan mengembangkan sistem proteksi sosial. Negara diharapkan menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja yang produktif dan pemerataan kesempatan usaha, agar setiap keluarga Indonesia memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup yang berkelanjutan[20]

Kader Posdaya berlatih membuat peta keluarga

Pengentasan kemiskinan akan lebih efektif melalui gerakan pemberdayaan keluarga. Semenjak ditetapkannya Peraturan

19 Dwidjo Utomo, *Posdaya Disabilitas,* (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2015), hlm. 25

20 Dwidjo Utomo, *Posdaya Disabilitas,*hlm. 26.

Pemerintah nomor 21 tahun 1994 yang secara terperinci menempatkan keluarga sebagai agen atau pelaku pembangunan lengkap dengan delapah fungsi utamanya yaitu: fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan,fungsi ekonomi,dan fungsi pemeliharaan lingkungan. Dengan delapan fungsi utamanya itu keluarga berkembang atau dibantu untuk berkembang menjadi keluarga yang modern, maju, profesional, berkualitas dan mandiri serta mampu mengembangkan dirinya sendiri, anak-anaknya, dan dalam kaitan keluarga yang lebih luas, ikut mengembangkan masyarakat dan bangsanya. Secara khusus keluarga dikembangkan menjadi wahana pembangunan bangsa.[21]

Strategi pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkuat pranata sosial, lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan budaya, serta membuka kesempatan peran pengambilan keputusan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun strategi penguatan kapasitas manusia sebagai subyek pembangunan untuk pengentasan kemiskinan oleh masyarakat sendiri dan menjadi gerakan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan dilandasi oleh keberpihakan kelompok keluarga lemah untuk dikuatkan, dientaskan, dan dimandirikan. Keluarga miskin perlu dilindungi, didampingi agar memiliki kekuatan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baik bersifat moril maupun material. Sering didapatkan dalam kehidupan sejumlah warga masyarakat yang bekerja dengan penghasilan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada pula warga

21 Haryono Suyono, *Memotong Kemiskinan*, (Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri), hlm. 5

masyarakat yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap sehingga lebih tidak beruntung dari yang pertama, dan masih ada juga yang tidak memiliki penghasilan sehingga tergolong miskin parah yang perlu perhatian khusus.

Pengentasan kemiskinan sebagai gerakan yang dimulai dari setiap keluarga terutama di perdesaan melalui "Gerakan Bangsa Suka Desa" yang dirumuskan oleh Haryono Suyono yaitu suatu strategi penggalangan komitmen dan dukungan untuk memberikan prioritas yang lebih besar pada pembangunan keluarga di perdesaan, sebab mayoritas keluarga miskin berada di desa. Adapun cara pemberdayaan keluarga dan anggotanya adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan komitmen**
   Upaya ini ditujukan untuk menumbuhkan komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan lembaga-lembaga yang ada, khususnya mereka yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan keluarga perdesaan agar memeberikan dukungan kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, diikuti dengan pengembangan kemitraan antar keluarga di desa.
2. **Pengembangan kesadaran**
   Menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat setiap keluarga agar mampu mengembangkan potensinya, khusunya di bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan.
3. **Pengembangan kesehatan**
   Setiap keluarga dapat menjaga keluarga agar hidup sehat dan secara gotong royong menata lingkungannya agar bersih dan sehat.

4. **Pengembangan pendidikan dan pelatihan**

   Membuka informasi, pengerahuan dan keterampilan serta penggunaan teknologi untuk keluarga miskin agar dapat meningkatkan usaha-usaha peningkatan ekonomi keluarganya.

5. **Membuat model**

   Instansi berwenang dan para relawan bekerja sama untuk memberikan bimbingan, pendampingan kewirausahaan, misalnya dengan mendirikan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk kegiatan ekonomi produktif dengan sistem PELAJU (petik, olah, jual) untuk kegiatan pertanian, dan PEMAJU (proses, kemas, jual, untung) untuk kegiatan non pertanian.

6. **Pengembangan modal**

   Pemerintah menyediakan pinjaman modal usaha dengan mudah dan ringan untuk usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga agar keluarga miskin bisa mengakses dengan mudah. Dianjurkan pula bagi keluarga untuk menabung gemar menabung.

7. **Pemasaran**

   Membantu keluarga miskin yang telah mempunyai usaha untuk memudahkan pemasaran dengan mengadakan pasar sabtu minggu (Pasar Tugu*)*, pasar posdaya, warung-warung, angkringan dan lainnya.

8. **Konsultasi pemecahan masalah**

   Keluarga miskin biasanya tidak memiliki cukup akses dan wawasan untk mengatasi masalahnya. Untuk itu disediakan relawan yang membantu memecahkan masalahnya mengkomunikasikan untuk beasiswa, jaminan sosial, kredit usaha, pemasaran, dan masalah keluarga lainnya.[22]

---

22 Baca: Haryono Suyono, *Panduan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Melalui Posdaya dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan,* (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2015), hlm. 17-20.

Ketua Umum Yayasan Damandiri Prof. Dr. Haryono Suyono meninjau pameran produk posdaya masjid Al Amin Kab. Malang

Bab III
REVITALISASI FUNGSI MASJID

A. Problem Internal Masjid

Sebagaimana uraian di atas bahwa untuk mengubah *mindset* masyarakat terhadap peran dan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat masih mengalami banyak hambatan. Problem umat Islam di seputar revitalisasi peran dan fungsi masjid antara lain;

1. Membangun fisik masjid

   Pengembangan masjid selama ini lebih banyak terkonsentrasi pada semangat pembangunan fisik masjid sebagai ekspresi seni budaya religius atau pertimbangan memperluas kapasitas jama'ah. Spirit membangun masjid ini merupakan manifestasi pengamalan sabda Rasulullah: Ketika Utsman bin Affan hendak membangun masjid dan masyarakat kurang mendukungnya maka Utsman berkata "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa membangun masjid maka Allah akan membangunkan baginya rumah

yang semisal dengan itu di surga" [23]. Ketika masjid telah dibangun dengan megah, jama'ah masjid semakin meningkat secara kuantitas tidak serta merta diikuti oleh peningkatan kualitas pembinaan jama'ahnya. Sehingga tidak heran jika di sekitar bangunan masjid yang megah masih ditemukan jama'ah yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

2. Pesan-pesan keagamaan

   Materi khutbah atau ceramah pengajian juga masih berupa doktrin teologis belum bergeser ke arah doktrin pemberdayaan, karena itu peningkatan kualitas pesan-pesan keagamaan untuk solusi terhadap problem kehidupan jama'ah perlu diprioritaskan. Norma hukum bersifat tetap secara kuantitatif, namun nilai dan spirit agama bersifat dinamis yang seharusnya digunakan untuk energi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan serta problem sosial lainnya. Problem dan realitas sosial terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan, maka masjid menjadi sentra pengembangan umat dituntut untuk merespon dinamika sosial yang dialami umat dengan tepat dan efektif. Dalam realitasnya upaya ini masih sangat minim dilakukan.

3. Penglolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

   Penggalangan dana untuk masjid di sejumlah daerah masih belum akuntabel dan transparan, bahkan kasus penyelewengan dana masjid, maupun praktik memanfaatkan masjid dalam menggalang dana umat untuk kepentingan pribadi atau kelompok masih sering terjadi. Karena itu dana masjid perlu dikelola secara profesional dan didukung

23 Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy), hlm. 378

oleh kebijakan pemerintah. Penggalangan dana melalui masjid yang telah akuntabel dan transparan, belum diikuti pula oleh pendistribusian yang memberdayakan untuk pengentasan kemiskinan.

4. Bantuan bersifat *charity*

   Mindset para takmir masjid mayoritas masih konservatif, sehingga dana masjid hanya digunakan untuk prokemiskinan sifatnya masih *charity* yang menggembirakan keluarga miskin sejenak, namun tidak dalam kapasitas penyadaran, penguatan mental kewirausahaan, dan kemandirian. Pola bantuan langsung tunai bukan mengentaskan kemiskinan mereka, justru memperkuat mental peminta-minta dan ketergantungan pada orang lain semakin besar. Konsep pendampingan partisipatif dengan pengkapasitasan jama'ah terutama yang masih pra sejahtera belum dilakukan secara massif di setiap masjid. Pendampingan tambal sulam tidak berkelanjutan masih menjadi budaya, sehingga masjid belum berfungsi secara maksimal dalam mengantarkan jama'ahnya lebih sejahtera.

5. Lemahnya sistem berjejaring

   Sebagian masjid yang seharusnya menjadi rumah Allah yang dikelola secara terbuka seringkali menjadi kerajaan kecil yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga akses dan partisipasi jama'ah menjadi menurun. Masjid teralienasi dari masyarakatnya, sebaliknya masyarakat teralienasi dari masjid mereka. Bagi masjid surplus dana, SDM dan manajemen yang telah mapan, biasanya lebih mandiri, namun kemandirian ini seakan memutus hubungan dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar masjid, seperti pemerintah, organisasi,

maupun kelompok masyarakat lain yang memiliki isu pemberdayaan dengan sasaran yang sama. Sinergitas ini belum tampak dalam gerak langkah mengantarkan keluarga pra sejahtera menjadi sejahtera. Ego sektoral ini menjadi tantangan pemberdayaan umat berbasis masjid yang harus didekonstruksi.

Problem internal ini seringkali berdampak pada ketidaktertarikan masyarakat untuk tergerak turut memakmurkan masjid. Partisipasi masyarakat muslim Indonesia dalam membangun masjid sudah cukup tinggi, bahkan di pelosok desa, di kampung-kampung, masjid berdiri kokoh meski di tengah-tengah kampung muslim yang mayoritas miskin. Kesadaran ini belum sepenuhnya sejalan dengan kegiatan mengisi masjid yang benar-benar mengubah masyarakat menjadi lebih sejahtera.

B. Model Revitalisasi Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid

Pemakmuran masjid di Indonesia memiliki keragaman dengan struktur organisasi dan model pemberdayaannya. Model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dipengaruhi oleh lingkungan di mana masjid didirikan. Misalnya masjid di lingkungan lembaga pendidikan berbeda dengan masjid di lingkungan instansi pemerintah, berbeda dengan masjid wakaf keluarga, dan berbeda pula dengan masjid yang didirikan oleh masyarakat secara gotong royong.

Beberapa model pemberdayaan masjid di Indonesia sebagai upaya menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat;

1. Model pemberdayaan masjid melalui kebijakan pemerintah yang didukung oleh regulasi atau dana APBD, misalnya Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Syuhada' Yogyakarta, dan masjid-masjid yang berada di pusat kota provinsi atau

kabupaten yang digunakan secara resmi oleh pejabat negara untuk shalat Idul Fitri atau Idul Adha;

2. Model pemberdayaan berbasis swadaya murni masyarakat dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia, misalnya, Masjid Al-Azhar Jakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, Masjid Sabilillah Malang, Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dan masjid-masjid lain yang tersebar di berbagai kota di Indonesia;

Dari dua model pemberdayaan masjid di Indonesia, penulis mencoba membandingkan model pemberdayaan masjid di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat oleh pemerintah Kabupaten, Masjid Jogokariyan di Yogyakarta menggunakan model pemberdayaan masjid melalui swadaya murni masyarakat sebagaimana uraian berikut ini.

1. Masjid di Kabupaten Agam

Model pertama, sebagaimana ditulis oleh Elfindi dan Munandar (2009)[24], tentang program pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat mencanangkan kebijakan pengentasan kemiskinan antara lain berbasis masjid yang diatur dalam Peraturan Bupati. Program unggulannya adalah memanfaatkan zakat, infaq, shadaqoh yang dikelola secara profesional untuk usaha produktif bagi keluarga miskin. Program ini bersifat struktural, di mana kekuatan *stakeholder* kunci (pengambil kebijakan) berperan dominan dalam membuat regulasi dan eksekusi di lapangan bersama dengan struktur kelembagaan masjid. Kekuatan pemberdayaan model ini; *Pertama*, memiliki payung hukum dan sumber daya yang pasti; *Kedua*, manajemen masjid berjalan mirip birokrasi; *Ketiga*, menempatkan masyarakat miskin sebagai *stakeholder* inti menjadi sasaran utama.

24 Elfindri dan Aristo Munandar, *Makmur Bersama Masjid Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani,* (Tanpa Kota: Baduose Media, 2009).

Hasil implementasi program pengentasan kemiskinan melalui masjid di Kabupaten. Agam dilakukan dalam *participatory action research* secara *longitudinal* tahun 2004-2005. Refleksi hasil program ini melahirkan enam tips pemberdayaan masjid versi Kabupaten. Agam sebagai berikut; *Pertama*, dalam memberdayakan masjid harus dimulai dari proses kajian berdasarkan survei, pemanfaatan data base, dan analisis mendalam terhadap kondisi masyarakat agar jelas arah pemberdayaannya; *Kedua*, tersedianya dewan pakar yang mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program; *Ketiga*, eksekusi pemberdayaan dilakukan dalam aktivitas jama'ah melalui masjid; *Keempat*, mendirikan BMT pada setiap nagari/desa; *Kelima*, manajemen yang kuat didukung oleh jejaring antar satuan kerja pemerintah kapupaten; *Keenam*, ketersediaan dana dari APBD juga diperkuat sumber-sumber dana lainnya.[25]

2. Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Masjid ini berdiri pada tahun 1967 di lingkungan masyarakat yang sangat kering dengan kehidupan religius. Gerakan pemberdayaan masjid dimulai oleh sekelompok jama'ah yang peduli terhadap masjid. *Stakeholder* kunci ini mengembangkan sayap gerakannya melalui multi strategi untuk menarik masyarakat aktif berjama'ah dan memakmurkan masjid. Dalam misinya, masjid Jogokariyan sebagai pusat kegiatan masyarakat mencakup kegiatan *ubudiyah*, sebagai tempat rekreasi rohani jama'ah, merujuk berbagai persoalan masyarakat, sebagai pesantren dan kampus masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut masjid Jogokariyan mendesain program kerjanya; *Pertama*, memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat; *Kedua,* membangun kelembagaan masjid yang secara professional,

25 Elfindri dan Aristo Munandar, *Makmur Bersama Masjid* ,.....hlm. 155-164

demokratis, tertib administrasi, efisiensi, transparansi dalam anggaran, serta menggali sumber dana dari jama'ah secara sukarela; *Ketiga,* mengembangkan seluruh potensi jama'ah bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan jama'ah; *Keempat*, mengembangkan dakwah jama'ah dan jama'ah dakwah dengan pendekatan kesejahteraan; *Kelima*, membina generasi muda, keluarga jama'ah yang sakinah sebagai benteng ketahanan umat melalui majlis ta'lim, dan peningkatan kualitas ibadah[26].

Program menarik dan unik dari Masjid Jogokariyan untuk menarik partisipasi jama'ah antara lain: *Pertama*, pemetaan dakwah melalui analisis sosial yang dijadikan sebagai data base konprehensif; *Kedua*, Data potensi jama'ah dimana masjid tidak membuka usaha tetapi memfasilitasi dan membesarkan usaha melalui pendampingan; *Ketiga*, gerakan shalat berjama'ah melalui undangan resmi; *Keempat*, pengelolaan keuangan setiap bulan harus sama dengan "NOL" untuk dimanfaatkan jama'ah yang memerlukan; *Kelima*, gerakan berjama'ah mandiri yaitu jama'ah yang berinfaq sesuai atau melebihi ketentuan yang telah dihitung berdasarkan kebutuhan operasional masjid setiap pekan. [27]

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa hal yang menarik dari pemberdayaan masyarakat melalui masjid di Kabupaten Agam adalah komitmen pejabat dan pakar, serta soliditas takmir masjid yang didukung oleh kebijakan anggaran pendampingan melalui APBD. Sedangkan karakteristik masjid Jogokariyan yang menarik adalah demokratisasi, manajemen kelembagaan masjid, dan memaksimalkan partisipasi jama'ah untuk memakmurkan masjid, sehingga masjid menjadi pusat aktivitas sosial keagamaan

26 Wahyu Tejo Raharja, Wawancara, 4 Pebruari 2013 di Masjid Jogokariyan

27 *Jogokariyan : Masjid yang hidup!,* Jurnal Irsyad, 17 Februari 2013, Situspembelajar. blogspot.com. Diakses 21 Maret 2013.

dan rumah bersama bagi jama'ah yang selalu terbuka 24 jam. Untuk melihat perbandingan kedua model tersebut dapat diperhatikan tabel berikut ini:

Tabel 1
Model Pemberdayaan Umat Melalui Masjid

Model Pemberdayaan Masjid	Strategi Pemberdayaan	Pelibatan Stakeholder	Jejaring	Sumber Dana
Kabupaten. Agam, Provinsi. Sumatera Barat	Implementasi kebijakan pemda untuk penaggulangan kemiskinan berbasis masjid	Stakeholder kunci ke stakeholder inti	Sinergi struktur pemerintah dan struktur masjid	APBD, jama'ah
Masjid Jogokariyan Yogyakarta	Gerakan memakmurkan masjid oleh jama'ah	Dari stakehoder kunci ke stakeholder pendukung	Antar potensi jama'ah (masjid mandiri)	Jama'ah

Bab IV
POSDAYA BERBASIS MASJID SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN UMAT

A. Konsep Posdaya Masjid

Konsep Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) pertama kali dirumuskan oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) yang disingkat DAMANDIRI oleh Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Umum Yayasan tersebut yang berdiri sejak tahun 1995. Posdaya merupakan program unggulan dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setelah memasuki Millenium III, posdaya berkonsentrasi tidak hanya peningkatan IPM tetapi juga percepatan capaian indikator MDGs terutama pada isu kemiskinan. Posdaya dikembangkan melalui kerjasama Yayasan Damandiri dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga/ organisasi sosial, kelompok masyarakat, termasuk masjid sebagai institusi keagamaan yang memiliki peran yang sejalan dengan visi posdaya.

Posdaya pada prinsipnya hendak memperkuat fungsi-fungsi keluarga agar setiap keluarga memiliki ketahanan lahir batin dalam menopang tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Jika setiap keluarga hidup sejahtera dan mandiri, maka bangsa Indonesia ini akan semakin kuat dan memiliki daya saing di tengah-tengan arus globalisasi. Dengan demikian posdaya adalah lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai forum silaturahim, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat.[28]

Masjid menyimpan potensi besar sebagai pusat gerakan masyarakat semakin nyata. Indikator ini dapat diperhatikan pada pengembangan peran dan fungsi masjid sebagaimana era Rasulullah, antara lain yaitu; *Pertama,* pusat pendidikan seumur hidup; *Kedua*, medan budaya untuk menyegarkan modal sosial dalam kontribusinya membangun peradaban; *Ketiga*, penggalangan sumber dana masyarakat lebih akuntabel dan transparan; *Keempat*, media mobilisasi umat untuk dakwah dalam berbagai bentuknya; *Kelima*, sarana membangun komunikasi intensif dalam relasi sosial para jama'ahnya melalui waktu shalat, sehingga intensitas, serta menjadi pusat pemecahan masalah umat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengentasan kemiskinan.

28 Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Pedoman Pelaksanaan Pos Pemberdayaan Keluarga*, (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2009),hlm. 7.

Kunjungan pimpinan UIN Malang di Posdaya Babussalam Kec. Pagak Kab. Malang

Posdaya berbasis masjid merupakan forum gerakan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong berbasis masjid dengan memanfaatkan modal sosial dan potensi jama'ah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri yang dilakukan dari jama'ah, oleh jama'ah dan untuk jama'ah. Posdaya ini diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk kemiskinan, radikalisme agama dan mempertahankan *Islam rahmatan lil alamin.* Oleh karena itulah, perspektif pengembangan posdaya berbasis masjid, tidak lain adalah memperkuat peran dan fungsi masjid sebagai penopang perubahan sosial dan kembali menempatkannya dalam upaya percepatan pencapaian indikator tujuan pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs).[29]. Indikator capaian dimaksud terdiri dari delapan sasaran hingga tahun 2015 yaitu:

29 Mufidah Ch, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid,* (Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 2011), 5.

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, target 2015 adalah mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan;
2. Pencapaian pendidikan dasar secara universal, target untuk 2015 adalah memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar;
3. Mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi tingkat kematian anak, target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5;
5. Meningkatkan kesehatan ibu dengan target mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan;
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya dengan target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/ AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya;
7. Menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan dengan target mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Pada tahun 2020 diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan dengan target perdagangan terbuka, tidak ada diskriminasi.

Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang. Mengembangkan usaha produktif, akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang.

Pemerintah Indonesia turut mendukung komitmen internasional ini melalui Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yakni, pembangunan nasional diarahkan pada tiga konsentrasi yang meliputi; *Pertama*, pro rakyat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro dan kecil; *Kedua*; keadilan untuk semua meliputi keadilan untuk anak, perempuan, ketenagakerjaan, hukum serta kelompok miskin dan termarjinal; *Ketiga,* pencapaian tujuan millenium dengan delapan sasaran MDGs, terutama pengentasan kemiskinan.[30]

Karena bagaimanapun indikator MDGs berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia, maka masjid sebagai lembaga sosial yang terlibat sebagai bagian penyelenggara aktifitas sosial kemasyarakatan selain fungsi religiusitasnya. Masjid juga dapat bermetamorfosis dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti ekonomi kewirausahaan, sosial, budaya, lingkungan hidup, teknologi tepat guna yang berbasis kebutuhan. Pengalaman-pengalaman masjid dalam pemberdayaan masyarakat juga semakin tumbuh seiring dengan gerak pemahaman agama secara progresif untuk menjawab masalah kemanusiaan yang berkembang saat ini. Masjid dengan potensi historis serta *local genius*-nya dapat menjadi pemeran langsung dan fasilitator dalam

30 Haryono Suyono, *Kumpulan Peraturan Pemerintah Sebagai Dasar Pelaksanaan Posdaya*, (Jakarta, Yayasan Damandiri, 2011), hlm.5.

pencapaian MDGs serta meningkatkan indeks pembangunan manusia.

B. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid

Tujuan pembentukan dan pengembangan posdaya berbasis masjid melalui "Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik Posdaya Berbasis Masjid" juga dibangun dari kehendak mengembangkan pemberdayaan yang mengintegrasikan gagasan memakmurkan masjid dan mengembalikan fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, pusat kesehatan masyarakat, berbagai kepentingan jamaah dengan tujuan kemaslahatan. Pengembangan KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid dalam perkembangannya dapat memenuhi dimensi-dimensi fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Bupati Malang dan Ketua Umum Yayasan Damandiri melepas peserta KKM tahun 2015

Bukanlah KKN

KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid dirancang mereformulasi model-model pengabdian yang bertujuan untuk kegiatan pemberdayaan. Fungsi mahasiswa bukan bekerja sebagai entitas

masyarakat akan tetapi berperan sebagai kelompok pendamping dengan posisi kemitraan bersama jamaah. Selain itu, kelompok mahasiswa tidak akan berorientasi memberikan sumbangan finansial atau membangun aspek-aspek infrastruktur yang dibutuhkan jamaah pada masjid sebagaimana kebiasaan dan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata). Konsep ini selalu ditekankan pada setiap pembekalan dan menjadi prioritas kunci yang disampaikan, dingatkan dan direproduksi dalam mendesain kegiatan pengabdian masyarakat terutama bagi dosen yang akan mendampingi mahasiswa agar mahasiswa dapat memposisikan dirinya bukan sebagai pekerja tetapi sebagai pendamping masyarakat.[31]. Melalui posdaya proses pemberdayaan keluarga dapat diakomodasi secara kolektif dan dikelola secara terencana, terukur dan sistemik.

Pembekalan peserta KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid Tahun 2015

Posdaya tidak memberikan modal finansial bagi pengembangan masjid, namun programnya berfungsi sebagai fasilitator bagi takmir masjid, masyarakat sekitar masjid dan pihak-pihak terkait. Posdaya menjadi kelompok pemberdaya yang memiliki peran strategis dalam berbagai bentuk jejaring antara kelompok-kelompok filantropi baik mereka berasal dari jamaah atau kelompok di luar

31 Mufidah Ch & M. Mahpur, *Posdaya Berbasis Masjid Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat,* (Malang: LPM UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 12.

jamaah yang memiliki kepedulian untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan keluarga. Posdaya diarahkan untuk menyentuh proses-proses pemberdayaan keluarga dari berbagai ragam tingkat dan kelompok masyarakat, seperti anak-anak, remaja, orang tua dan lansia dan kelompok disabilitas dengan berbagai level status sosial, ekonomi dan budaya. Kelompok tersebut dikelola dan diakomodir secara partisipatif agar mereka menjadi kelompok berdaya dengan berbagai peran yang saling sinergi. Dalam konteks ini pelibatan seluruh *stakeholder* sangat penting dalam melakukan perubahan.

C. Langkah-langkah Mendirikan Posdaya Masjid melalui KKM

Langkah pertama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di setiap perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian masyarakat dengan membuka ruang konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pejabat daerah di tingkat kecamatan, desa, kelompok masyarakat serta instansi terkait yang mendukung, serta ta'mir masjid akan pentingnya kebersamaan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM, melalui pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) berbasis masjid, baik masjid tingkat kecamatan, desa, dusun/ pedukuhan.

Langkah selanjutnya, dilakukan pendataan dan observasi seluruh sasaran keluarga yang tinggal di wilayah masjid. Pendataan yang seksama itu bertujuan untuk mengidentifkasi dan menempatkan keluarga sasaran dan memetakannya dalam kondisi atau posisi sesuai dengan indikator yang dipergunakan, misalnya ditempatkan sebagai kelompok keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, III, dan III Plus. Untuk kelompok pra sejahtera dan sejahtera I dianalisis masalah dan kebutuhan mereka untuk meningkat pada posisi yang lebih baik.

Kelompok keluarga sejahtera II sampai III Plus diajak ikut serta membantu keluarga yang kurang beruntung untuk mengatasi masalah melalui pendampingan.

Bupati Malang, Ketua Umum Yayasan Damandiri dan Rektor UIN Malang Menunjukan Peta Keluarga di acara Gemari Semanggi tahun 2015

Setelah posdaya terbentuk dan pendataan selesai dilakukan dan dianalisis, para mahasiswa diharapkan mengajak seluruh keluarga di sekitar posdaya untuk mengadakan pertemuan atau sarasehan dan membentuk pengurus posdaya. Selanjutnya mahasiswa mendampingi dan membantu pengurus posdaya menetapkan prioritas sasaran, menyusun program kerja dengan mengembangkan gagasan inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para mahasiswa mendampingi dan dalam hal- hal tertentu, membantu melaksanakan program atau kegiatan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.

Karena posdaya diarahkan untuk menjadi lembaga pedesaan yang mandiri, maka program utama yang dianjurkan adalah pemberdayaan ekonomi keluarga, utamanya kegiatan ekonomi mikro dalam bentuk usaha bersama, kemudian dikembangkan menjadi koperasi. Kegiatan ekonomi rumah tangga bersama itu akan meningkatkan kemampuan setiap keluarga untuk memberikan dukungan pada kegiatan posdaya lainnya, yaitu

dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, KB dan kesehatan, pemeliharaan lingkungan yang kondusif, serta pembinaan keagamaan dan menciptakan suasana religius untuk ketahanan mental spiritualnya.

Langkah-langkah untuk melaksanakan KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid untuk pembentukan dan pengembangan posdaya pada hakikatnya merujuk kepada Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Damandiri, menyangkut proses dan pengisian program lembaga posdaya tersebut. Mengingat luasnya materi dan bidang garapan yang dicakup, maka dalam kegiatan KKM Tematik Posdaya para mahasiswa dengan dikoordinasikan para dosen pembimbing lapangan perlu membentuk suatu team dengan latar belakang ilmu dan jurusan yang berbeda-beda sesuai bidang garapan yang dirancang.[32]

Kader posdaya melakukan penyusunan program posdaya berbasis data dan peta keluarga

32 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik Posdaya Berbasis Masjid 2015*, hlm. 8-10.

D. Indikator Keberhasilan Posdaya Masjid

Program posdaya berbasis masjid telah dikembangkan di 23 perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Provinsi Jawa Timur dan beberapa PTKI di provinsi lain. Hingga tahun kelima (2015), di Jatim saja telah berdiri dan dikembangkan lebih dari 1.500 posdaya masjid dengan menurunkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Program kegiatan dikonsentrasikan pada lima bidang yaitu bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan pemberdayaan lingkungan termasuk jejaring dengan pihak terkait.

Secara umum indikator keberhasilan posdaya masjid mengacu pada 8 indikator MDGs yang dimodifikasi dan diadaptasi sesuai kondisi lokal. Berdasarkan pengalaman pendampingan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa posdaya masjid yang disebut berhasil jika:

1. **Tergali dan berkembangnya kecerdasan masyarakat**

Posdaya dikembangkan melalui paradigma ilmu sosial kritis. Karakteristik paradigma ilmu sosial kritis dalam praktik gerakan posdaya antara lain adalah: *Pertama*, membangun kesadaran diri dan kemampuan diri warga masyarakat untuk memperbaiki keadaan; *Kedua*, semangat gerakan pembebasan dari kemiskinan dan ketergantungan untuk menjadi mandiri; *Ketiga*, partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bekerjasama, berjejaring dan aksi-aksi sinergi; *Keempat*, menggunakan ragam metode dan pendekatan interdisipliner; *Kelima*, berorientasi pada proses perubahan sistem sosial, meningkatnya status keluarga dari keluarga pra sejahtera ke level di atasnya dan seterusnya.

Kemiskinan dan ketertinggalan serta marjinalisasi yang terjadi di masyarakat telah menutup akses, partisipasi, kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan, rasa percaya diri, bahkan kesalahan dalam mengenali diri mereka sendiri. Kemiskinan menyebabkan seolah-olah seseorang tidak memiliki kuasa, daya, dan kecerdasan. Padahal, setiap orang telah dianugerahi bermacam ragam potensi kecerdasan oleh Allah sebagai *khalifatullah* di muka bumi baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional atau sosial, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual dan kecerdasan beragama lainnya. Pandangan masyarakat selama ini masih menganggap bahwa pendidikan formal menjadi satu-satunya sarana mengembangkan kecerdasan. Dalam realitasnya kecerdasan masyarakat dapat dikembangkan melalui praktik kehidupan sehari-hari. Karena itu menggali kecerdasan masyarakat dalam gerakan posdaya ini dengan cara menghargai pengalaman masyarakat sebagai sumber belajar bersama. Gerakan posdaya adalah gerakan mencerdaskan masyarakat. Kecerdasan menjadi tolak ukur keberhasilan gerakan posdaya antara lain: *Pertama,* warga masyarakat memiliki kesadaran kritis dimana mereka mampu mendifinisikan apa yang sedang dialami bersama keluarga mereka, seperti kemiskinan, kelemahan, kekurangan, kekuatan serta potensi diri, kemudian mengurai melalui analisis sosial sederhana sehingga muncul inisiasi untuk berubah; *Kedua*, warga masyarakat mampu memahami bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan melalui pengembangan potensi dan kecerdasan mereka sendiri dengan cara menjadi pembelajar yang baik yang disertai dengan pendampingan pihak-pihak terkait; *Ketiga*, warga masyarakat semakin kreatif dalam mengembangkan ide-ide untuk pengentasan kemiskinan seperti dalam proses PELAJU

(petik, olah, jual) dan PEMAJU (proses, kemas, jual, untung). *Keempat*; semakin percaya diri dalam partisipasinya di ruang publik terutama perempuan dan keluarga miskin sehingga kontribusinya dalam pengambilan keputusan partisipatif semakin nyata; *Kelima*, mampu memecahkan masalahnya sendiri, belajar berproses, dan memiliki keinginan kuat untuk mengubah diri menjadi lebih maju, mandiri dan berfikir prospektif.

2. **Munculnya tokoh lokal sebagai penggerak posdaya**

Posdaya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif, inklusif, menghargai pengalaman modal manusia (*human capital*), telah melahirkan orang-orang lokal yang memiliki komitmen pemberdayaan. Pendekatan humanis berbasis nilai-nilai kearifan lokal, silaturahim, memanfaatkan jejaring yang sudah tersedia seperti jama'ah masjid, remaja masjid, majlis taklim, organisasi sosial dan keagamaan, PKK, jama'ah tahlil, jama'ah yasinan, jama'ah shalawat Nabi, kelompok tani, karang taruna, kelompok-kelompok masyarakat mempercepat munculnya relawan-relawan sebagai penggerak posdaya masjid. Sejumlah tokoh penggerak posdaya masjid ini hadir secara tiba-tiba dan natural kemudian menjadi bagian dari tokoh yang diperhitungkan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini membuka akses dan partisipasi maupun kontrol atas sumber daya serta pengambilan keputusan penting dalam komunitasnya untuk pengembangan posdaya. Karakter tokoh lokal pengembang posdaya ini antara lain: *Pertama*, memiliki kemampuan untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas; *Kedua*, memiliki kemampuan menjadi *role model* bagi jama'ah/ anggota posdaya di lingkungannya, maupun menjadi sumber inspirasi bagi posdaya lain dalam mengembangkan dan

mengisi posdaya sesuai program prioritasnya; *Ketiga*, memiliki kemampuan memotivasi dan mengorganisir masyarakat dengan menggunakan modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal yang dipedomani masyarakat; *Keempat*, mamiliki kemampuan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural, menjadi fasilitator yang baik, memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, memediasi, dan *problem solving*, serta pengambilan keputusan secara partisipatif;

Kelima, mau memjadi pembelajar yang baik, artinya posdaya merupakan forum yang memaknai semua proses pengembangan posdaya merupakan sarana belajar baik dari keberhasilan, kegagalan, dan problem yang dihadapi sehingga semakin hari kader posdaya mampu mengambil pelajaran untuk pengembangan posdaya yang berkelanjutan.

Posdaya Al-Amin mendapatkan Damandiri Award
Posdaya Terbaik I Tingkat Nasional, 2014

3. Berkembangnya modal sosial

Posdaya berbasis masjid berdiri dan berkembang dengan pendekatan partisipatif, menghargai kearifan lokal, memperkokoh jaringan sosial bahwa masyarakat merupakan sistem yang

tidak dapat dilihat secara parsial tetapi harus dilihat secara komperhensif, sehingga terwujud kebersamaan menjadi praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Segarnya modal sosial sebagai salah satu indikator keberhasilan posdaya masjid antara lain: *Pertama*, pemanfaatan ruang-ruang budaya yang sangat beragam di masyarakat khususnya di sekitar masjid semakin tumbuh dan berkembang lebih maju sebagai *effect* dari silaturahim intensif antara kader penggerak posdaya; *Kedua*, menguatnya solidaritas masyarakat untuk gotong royong, bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan atas dasar saling memahami, menghargai, menghormati, dan saling mempercayai; *Ketiga*, menguatnya soliditas kader posdaya sehingga muncul rasa memiliki dan keperpihakan kemudian membentuk identitas sosial yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Soliditas ini dapat memperkokoh silaturahim antar kader dan berupaya agar posdaya semakin maju, dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi bagian dari dakwah *bil hal*; *Ketiga*, menguatnya jejaring antar kader posdaya dan masyarakat luas, di mana setiap individu mampu memanfaatkan forum silaturahim ini secara partisipatif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan, serta bisa berkontribusi satu sama lain. Jejaring ini juga didukung oleh pemerintah setempat dengan memanfaatkan dana desa dan program-program sinergis; *Keempat*, tumbuh dan berkembangnya inisiasi warga untuk melakukan **lelang kepedulian** dari orang yang mampu (keluarga sejahtera III dan III plus) kepada yang tidak mampu untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mengeluarkan zakat, infaq, waqaf, dan shadaqah dalam ragam bentuknya, bisa dengan dana, beasiswa, fasilitas, peralatan, sarana prasarana, tenaga, dan bahkan membuka akses agar keluarga pra sejahtera

dan sejahtera I terhubung dengan sumber-sumber daya untuk mengatasi masalahnya.

Posdaya Babussalam Desa Tempur Kec. Pagak Melakukan Musyawaran dan Lelang Kepedulian Berdasarkan Peta Keluarga

4. Potensi alam menjadi solusi penanggulangan kemiskinan

Sumber daya alam merupakan sahabat keluarga. Lingkungan sekitar dan berbagai potensi alam merupakan sumber penghidupan masyarakat belum dikelola dengan maksimal. Kemiskinan bisa terjadi karena belum tergarapnya sumber daya alam yang menyimpan kekayaan untuk pengentasan kemiskinan. posdaya disebut berhasil dari aspek ini adalah: *Pertama*, gerakan menghidupkan lahan tidur dan gerakan menanam tanaman produktif jangka pendek seperti sayuran di sekitar rumah juga bernilai ekonomis; *Kedua,* kemampuan menggunakan teknologi terapan dengan alat-alat sederhana sehingga masyarakat mampu menggunakan peralatan tersebut dengan mudah, biaya murah sehingga siklus kegiatan kewirausahaan semakin cepat berorientasi pada percepatan pengentasan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di lingkungan mereka sendiri; *Kedua*, kemampuan masyarakat membuka akses dan mengembangkan

kreatifitasnya dalam pemanfaatan seluruh potensi lokal berwawasan lingkungan dengan benar untuk menjadi sumber penghasilan; *Ketiga*, terbentuknya kelompok-kelompok usaha khususnya bagi keluarga pra sejahtera mempercepat proses pemanfaatan potensi alam dan sumber daya lokal dengan pola PELAJU dan PEMAJU.

Pemanfaatan lahan dan potensi sekitar rumah warga untuk pemberdayaan ekonomi

5. Dukungan kuat dari *stakeholder*

Posdaya akan berhasil jika *stakeholder* memiliki komitmen politik maupun sosial bersama-sama sejalan dan seirama. Pendampingan masyarakat sekitar masjid tidak lepas dari peran mereka. Untuk itu dalam konteks advokasi posdaya dapat digolongkan menjadi 4 macam yakni *stakeholder* primer, skunder, kunci, dan musuh atau lawan[33].

Pertama, penerima advokat (*stakeholder* primer), merupakan pendukung utama dan terpercaya, sebab mereka memiliki kepentingan langsung dalam menerima manfaat dan menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini adalah para jama'ah anggota posdaya

33 Susilo Kusumosubroto, *Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Strategi Advokasi*, Http/doc.google.com. Diakses, 19 September 2014.

khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I makin hari makin naik statusnya menuju level lebih tinggi; *Kedua*, mitra (*stakeholder* sekunder), mencakup individu, kelompok, organisasi untuk usaha advokasi dan kontribusinya di masyarakat. Termasuk kelompok ini adalah lembaga-lembaga sosial yang konsen dalam menyebarluaskan informasi posdaya berbasis masjid, melakukan pendampingan. Misalnya, para pakar, peneliti, dan relawan yang turut mendukung upaya-upaya tersebut, dan telah mampu melakukan lelang kepedulian; *Ketiga*, pembuat keputusan (*stakeholder* kunci), yakni kelompok yang mempengaruhi kebijakan, perencana melalui program-program strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui *stakeholder* kunci ini program advokasi posdaya dapat mencapai target-target bermakna dan lebih strategis dengan hasil maksimal; *Keempat*, *stakeholder* musuh atau lawan adalah kelompok maupun individu yang menolak bahkan pada posisi melawan terhadap program posdaya masjid. Biasanya mereka memiliki kepentingan tertentu sehingga menjadi hambatan atau tantangan bagi ketiga *stakeholder* lainnya. Perubahan *mindset*, sikap dan perilaku *stakeholder* musuh menjadi *stakeholde*r pendukung merupakan indikator bahwa posdaya dapat diterima oleh masyarakat dalam semua lapisan dan kelompok masyarakat.

Pendekatan partisipatif dan sinergi antar-*stakeholder* dapat mengubah struktur kognitif komunitas masjid dan aktifitas manajemen masjid yang mentransformasi peran dan fungsi masjid yang dikelola untuk kebutuhan ibadah *mahdah* menuju pengelolaan masjid yang lebih responsif pada kebutuhan jamaah. Kebutuhan tersebut melahirkan sistem kelola masjid sebagai pusat pemberdayaan sehingga intensitas keterlibatan jamaah mendorong lahirnya tokoh-tokoh pemberdayaan inspiratif sebagai

lokomotif perubahan sosial yang mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat.

Stakeholder posdaya masjid berdiskusi dengan relawan untuk menggali potensi masyarakat

E. Hasil Pengembangan Posdaya Masjid

Produk posdaya berbasis masjid secara umum telah berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan jama'ah; *Pertama,* bidang keagamaan, maraknya forum diskusi sosial keagamaan pada semua level usia, perubahan materi ceramah/ khutbah dari doktrin teologis menjadi doktrin pemberdayaan bertambahnya jamaah masjid dari semua kelompok usia; *Kedua*, bidang pendidikan mencakup berdirinya PAUD dan TPQ baru dan bertambahnya jumlah santri TPQ dengan kualitas pembelajaran lebih meningkat, terbentuknya perpustakaan masjid, pengenal penggunaan IT dengan benar untuk pendidikan, akses beasiswa bagi jama'ah kurang mampu, meningkatnya jumlah anak yang mendapatkan beasiswa, tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi; *Ketiga*, bidang kesehatan membangun jejaring dengan puskesmas, bidan desa, PLKB, perubahan pemahaman masyarakat tentang kesehatan keluarga/reproduksi dan bayi/

balita, terlayaninya keluarga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan, memfasilitasi akses pemeriksaan kesehatan lansia, ibu hamil dan bayi/balita; *Keempat*, bidang kewirausahaan meliputi menguatnya mental kewirausahaan terutama bagi jama'ah miskin dan pengangguran, bertambahnya minat dan jumlah jama'ah masjid (ibu RT) untuk membuka usaha kecil berbasis rumah tangga dengan beragam, meningkatnya partisipasi pengusaha kecil pemula untuk mengakses pinjaman modal di lembaga keuangan masjid dan Bank UMKM, tumbuh dan menguatnya jejaring berwirausaha hingga pemasaran produk; *Kelima*, bidang lingkungan dan kerjasama antara lain penataan lingkungan masjid dan menanam tanaman produktif di sekitar masjid yang diikuti gerakan di setiap keluarga dan masyarakat luas, menguatnya kerjasama dengan berbagai pihak misalnya pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa posdaya berbasis masjid memiliki pola dan strategi yang berbeda dengan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid lainnya. Jika diperhatikan pada pemberdayaan masjid di Kabupaten Agam Prov. Sumatera Barat dan Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagaimana tabel 1 pada bab sebelumnya terdapat perbedaan dengan posdaya berbasis masjid. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2
Perbandingan Model Pemberdayaan Umat Melalui Masjid dan Posdaya Masjid

Model Pemberdayaan Masjid	Strategi Pemberdayaan	Pelibatan Stakeholder	Jejaring	Sumber Dana
Kabupaten Agam, Provinsi. Sumatera Barat	Implementasi kebijakan pemda untuk penaggulangan kemiskinan berbasis masjid	Stakeholder kunci ke stakeholder inti	Sinergi struktur pemerintah dan struktur masjid	APBD, jama'ah
Masjid Jogokariyan Yogyakarta	Gerakan memakmurkan masjid oleh jama'ah	Dari stakehoder kunci ke stakeholder pendukung	Antar potensi jama'ah (masjid mandiri)	Jama'ah
Posdaya Berbasis Masjid	Gerakan masyarakat mandiri dari,oleh,untuk masyarakat berbasis masjid, KKN perguruan tinggi	Mempertemukan 4 stakeholder (inti, kunci, pendukung, penentang)	Sinergitas seluruh komponen, struktur sosial & individu pemberdaya	Jama'ah, lembaga keuangan, APBD, CSR

Ketua LP2M memimpin pertemuan para stakeholder posdaya untuk proses sosialisasi keberlanjutan program Posdaya Masjid

PIMPINAN CABANG
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG
JAWA TIMUR

Bab V
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori strukturasi dibangun oleh Anthony Giddens berawal dari kegelisahan akademiknya terhadap para pemikir sebelumnya yang cenderung menggunakan interpretasi naturalis yang berangkat dari filsafat positivis yang berdampak pada reduksionalis dan esensialis dalam pengembangan teori sosial. Menurut paradigma positivis memandang bahwa masyarakat sebagai ekspresi prinsip identitas dan perkembangan yang melandasi masyarakat. Aktor direduksi sebagai produksi kekuatan sosial yang *impersonal* dan *determinatif* [34].

Berdasarkan pengalaman gagalnya pemikiran tradisional dalam mengkonsepsikan hakikat struktur dan tindakan serta hubungan timbal balik keduanya, Giddens menyimpulkan bahwa perlu adanya rekontruksi dalam teori sosial. Rekonstruksi dimaksud

34 Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Terjemah: Sigit Jatmiko, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 192.

adalah melakukan kritik terhadap tiga madzhab teori sosial yaitu sosiologi imperatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Namun ketiga teori tersebut menurutnya tidak untuk ditinggalkan, tetapi untuk mencari solusi terhadap kekuragan dari ketiganya. Giddens menamakan upaya ini dengan istilah "rekonseptualisasi"[35]

Giddens juga menegaskan bahwa kehidupan sosial manusia bisa dipahami berdasarkan relasi-relasi di antara individu-individu yang bergerak, dan membedakan satu konteks dari konteks yang lain. Konteks-konteks membentuk latar (*setting*) bagi tindakan, di mana kualitas-kualitas agen secara rutin dibentuk berdasarkan arah pengorientasian apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka katakan satu sama lain.[36]

Pandangan Giddens terhadap modernisasi dapat dilihat dalam buku "*Modernitas and Self Identity*" (1991) dengan fokus perhatiannya pada aspek mikro/ jati diri (*self*). Kedirian dimaksud senantiasa berdialektika dengan institusi masyarakat modern. Transformasi dalam identitas diri dan globalisasi adalah dua kutub dialektika kondisi lokal dan global medernitas. Perubahan aspek keintiman kehidupan pribadi berkaitan langsung dengan kemapanan hubungan sosial yang paling luas cakupannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia "diri" dan "masyarakat" saling berkaitan dalam lingkungan global.[37]

35 Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial Observasi ,.....hlm. 193

36 Anthony Giddens dan Jonathan Turner, Sosial Theory Today, Terjemah: Yudi Santoso, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 367

37 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Terjemah: Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 555).

Kegiatan masyarakat di Posdaya Masjid Al Falah Kec. Gedangan Kab. Malang

Menurut Giddens modernisasi menyebabkan perubahan sosial dan tantangan luar biasa yang ia sebut sebagai "panser raksasa" atau *juggernaut*. Ia menegaskan bahwa kehidupan kolektif modern ibarat panser raksasa tersebut melaju hingga taraf tertentu bisa dikendalikan, tetapi juga terancam akan lepas kendali sehingga menyebabkan dirinya hancur lebur. Panser raksasa ini akan menghancurkan orang yang menentangnya dan meski kadang menempuh jalan teratur, namun ia juga sewaktu-waktu dapat berbelok arah yang tidak terbayangkan. Perjalananya bukan sama sekali tidak menyenangkan atau tak bermanfaat. Adakalanya memang menyenangan dan berubah sesuai yang diharapkan. Tetapi sepanjang intstitusi modernitas ini terus berfungsi, kita tidak akan pernah mampu mengendalikan sepenuhnya baik arah maupun kecepatan perjalananya. Kita pun takkan pernah merasa aman sama sekali karena kawasan yang dijelajahinya penuh dengan bahaya.[38]

Ungkapan Giddens tersebut mengindikasikan bahwa modernisasi memiliki kekuatan yang lebih besar dalam melakukan perubahan sosial dibanding dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sebagai agen perubahan itu sendiri yang berfungsi

38 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern….,hlm. 553.

mengendalikannya. Giddens menyebut masyarakat modern dengan masyarakat beresiko melihat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Giddens melihat bahwa individu-individu dalam masyarakat yang tidak berdaya harus diberdayakan. Dalam hal ini ia menentang teori amputasi yang berangkat dari teori struktural fungsional.

Perspektif teori strukturasi ini dapat mengubah pandangan dominasi peran-peran modern seperti pemanfaatan hasil teknologi yang berpotensi dilakukan oleh masyarakat. Jika tidak dilakukan maka panser raksasa akan menggilas mereka yang tertinggal. Dengan demikian masyarakat dalam perspektif teori strukturasi ini perlu memiliki kesadaran mengubah dirinya membangun konsensus untuk mempersiapkan SDM yang lebih baik. SDM yang tinggi menjadi modal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Teori Strukturasi ini fokus pada masyarakat modern yang berubah dan berkembang sehingga bercirikan anti kemapanan. Modernisasi sendiri dipandang sebagai pisau bermata dua, satu sisi memberikan manfaat pada maunusia, tetapi di sisi lain bisa mengancurkan ibarat 'panser raksasa' yang siap melindas siapa saja yang tidak siap menerima perubahan. Pada *term* ini kelompok termarjinal dan keluarga miskin merupakan kelompok paling rentan tergilas panser tersebut.

Modernisasi juga menimbulkan resiko institusional maupun lingkungan seperti pasar modal global, menurunya urgensi agama bagi masyarakat dunia modern juga menimbulkan "keterasingan pengalaman" (*sequestration of experience*) dan ketidakberartian pribadi akibat meningkatnya peran sistem abstrak dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut Giddens sebagai panser raksasa yang menimbulkan ketidak

nyamanan sosial, bahkan ancaman distorsi teologis/moral untuk itu dengan modernitas dapat mengubah risiko/ancaman menjadi peluang dan tantangan yang dapat bermanfaat dalam perubahan sosial menjadi lebih baik. Menurut Giddens problem ketesingkiran moral dalam kehidupan masyarakat modern akan teratasi ketika kehidupan melampaui modernitas bahkan remoralisasi akan menempati posisi sentral dalam masyarakat akhir era modern. [39]

Dalam membangun masyarakat, Giddens mengkritisi teori Auguste Comte, Durkheim, tentang masyarakat yang dianalogkan dengan tubuh manusia. Setiap individu berfungsi secara sistematis mewujudkan stabilitas sosial dalam masyarakat. Parson misalnya, jika bagian tubuh tidak berfungsi maka harus diamputasi sebab jika dibiarkan akan merusak sistem yang ada. Bagi Giddens, setiap individu dalam masyarakat perlu diberdayakan dengan memanfaatkan alam bawah sadarnya. Masyarakat terus berkembang dengan melibatkan semua unsur masyarakat, sebab setiap anggota masyarakat pada dasarnya dapat berkontribusi melakukan perubahan sosial dalam mengahadapi modernisasi dan resiko-resiko yang ditimbulkannya.

Asumsi dasar yang dikemukakan oleh teori strukturasi ini bahwa ditemukan naturalisme yang mampu membangkitkan masyarakat marjinal, subordinat, proletar akan berfungsi dengan baik dalam menciptakan konsensus dalam struktur sosial. Menurut teori strukturasi, hubungan pelaku (*agency*) dan struktur (*structure*) sangat erat. Perbedaan antara pelaku dan struktur adalah jelas. Akan tetapi apakah perbedaannya itu berbentuk dualisme atau dualitas? Bagi Giddens, antara

39 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern ……, hlm. 2005:559.

pelaku dan struktur adalah hubungan dualitas dan bukan dualisme. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa konstitusi agen dan struktur bukan merupakan dua kumpulan fenomena biasa yang berdiri sendiri (dualisme), tetapi mencerminkan dualitas. Ciri-ciri struktural sistem sosial adalah sekaligus medium dan hasil praktik sosial yang diorganisir berulang-ulang, atau momen memproduksi tindakan juga merupakan salah satu reproduksi dalam konteks pembuatan kehidupan sehari-hari.[40]

Dosen, PD DMI dan relawan posdayamasjid sedang melaksanakan impact study terhadap program dan kegiatan posdaya

40 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern……, hlm.

Bab VI
SISTEM POSDAYA BERBASIS MASJID PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI

Proses implementasi program posdaya berbasis masjid dalam perspektif teori strukturasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Modal sosial seperti kebersamaan, gotong royong, keikhlasan, kejujuran, kepedulian, konsisten, soliditas digunakan untuk menggali potensi keluarga terutama keluarga miskin. Modal sosial yang diperkaya dengan kearifan lokal digunakan oleh para kader posdaya, takmir masjid (struktur) untuk memberdayakan umat (*agency*) dan membangun konsensus/komitmen dengan mengaktifkan alam bawah sadar, sehingga dapat memecahkan masalah yang mendasar di seputar isu-isu kehidupan di masyarakat.
2. Relasi struktur dan agen yakni para *stakeholder* posdaya berbasis masjid atas dasar kedekatan emosional, kesadaran, soliditas melahirkan rasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap isu-isu keluarga yang memerlukan pendampingan, pemberdayaan dan solusi.

3. Konsensus yang dibangun oleh struktur-agen kemudian digunakan sebagai upaya melakukan perubahan pandangan, sikap dan juga perilaku, sehingga masjid tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah murni, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. Konsensus ini dapat menjadi kekuatan yang mengubah dari posisi masyarakat *powerless* (tak berdaya) menjadi masyarakat *powefull* (berdaya) melalui gerakan seluruh komponen masyarakat melalui posdaya berbasis masjid.
4. Perubahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara: *Pertama*, pendataan keluarga untuk mengetahui peta keluarga mulai dari yang paling miskin hingga yang telah sejahtera. Peta keluarga ini bermanfaat untuk membangun kepedulian terhadap situasi umum masyarakat sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pemberdayaan; *Kedua*, pendampingan kader posdaya dengan menggali potensi yang dimiliki yang selama ini masih belum tergali dengan baik karena belum mendapatkan pendampingan secara tepat.; *Ketiga*, memberikan perhatian khusus terhadap keluarga miskin sebagai dampak kultural maupun struktural; *Keempat*, memfasilitasi dan memediasi kebutuhan kader posdaya dengan pihak-pihak terkait agar mereka dapat mengakses sumber daya yang diperlukan.
5. Seluruh proses tersebut dilakukan dalam praktik sosial di sepanjang ruang dan waktu secara berkelanjutan melalui pendampingan LP2M perguruan tinggi Islam, didukung oleh partisipasi mahasiswa KKN dan para dosen pembimbing lapangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut ini.

Bagan Implementasi Posdaya Masjid Perspektif Teori Strukturasi

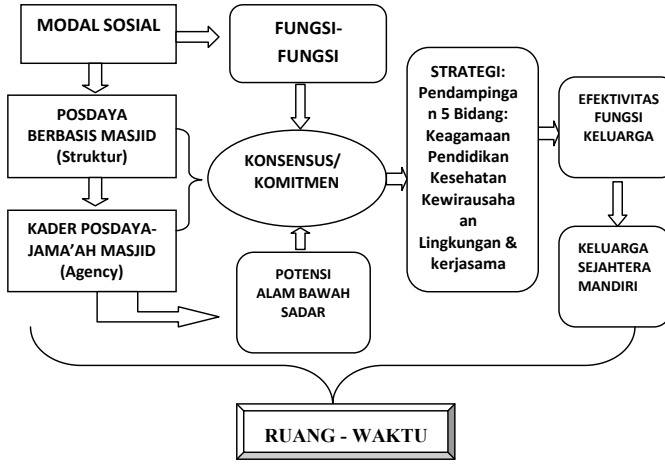

Implikasi dari perspektif teori strukturasi dalam mengimplementasikan posdaya berbasis masjid adalah:

1. Masyarakat yang sejahtera mandiri akan terwujud dengan cara tidak mempertahankan *status quo* yang mencerminkan diskriminasi sosial. Masjid dan jama'ahnya merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat. Masjid sebagai ruang budaya atau medan sosial yang terbuka dalam menerima perubahan tanpa membedakan apapun status sosialnya.
2. Posdaya sebagai forum silaturahim yang bercirikan gerakan gotong royong melalui posdaya berbasis masjid tidak membiarkan jama'ahnya tertinggal dari yang lain sebagaimana filosofinya praktik shalat berjama'ah yang didahului pemberitahuan melalui adzan dan iqomah. Jika tertinggal tetap diakomodir menjadi makmum *masbuq*. Pengentasan kemiskinan melalui posdaya

masjid justru memberikan prioritas kelompok rentan untuk difasilitasi agar tidak dianggap merusak sistem.

3. Demokrasi dalam pembangunan tidak akan terwujud tanpa kehadiran seluruh komponen masyarakat secara setara dan adil, atau tidak ada demokrasi tanpa kehadiran partisipasi masyarakat sepanjang ruang dan waktu. Karena itu seluruh jama'ah kader posdaya memiliki kontribusi dalam berbagai bentuknya sesuai dengan potensi dan kompetensinya masing-masing. Masjid tidak lagi menjadi kerajaan kecil yang dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, dan mengembalikan masjid sebagai rumah Allah.
4. Kesadaran untuk mengubah diri menjadi sejahtera dilakukan dengan memanfaatkan alam bawah sadar seluruh *stakeholder* di masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Posdaya didirikan dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, komitmen dan menyegarkan modal sosial sehingga mereka mengubah diri tanpa tekanan, bahkan memperoleh manfaat lebih besar dari yang mereka bayangkan sebelumnya.
5. Modernisasi menuntut kerjasama dan membangun jaringan yang kuat. Kolaborasi antara jama'ah yang memiliki surplus sumber daya dengan yang minus sumber daya agar mereka tidak mengalami kesenjangan dan ketertinggalan sehingga menjadi korban 'panser raksasa'. Kelompok kaya dan miskin memiliki kontribusi bersama dalam pembangunan melalui fungsi-fungsi keluarga secara gotong royong.
6. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah sebagai *stakeholder* kunci menjadi unsur penting dalam mendekonstruksi pandangan terhadap peran dan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, serta pandangan yang kurang tepat terhadap konsep dan implementasi pengentasan keluarga miskin

dengan model *charity* yang justru tidak memberdayakan tetapi memperkuat mental peminta-minta.

7. Partisipasi seluruh kader posdaya dalam praktik sosial yang mengusung kerjasama, gotong royong di sepanjang ruang dan waktu turut mempercepat proses perubahan dari keluarga miskin menuju keluarga sejahtera mandiri. .
8. Nilai-nilai dalam praktik sosial yang positif yang dapat berkompromi, beradaptasi, berfungsi mendukung kearifan lokal sebagai kekuatan menyegarkan modal sosial.
9. Memberi perhatian khusus terhadap kelompok termarjinal masuk ke dalam peran-peran dan kegiatan strategis posdaya agar tidak ada lagi gap antar kelompok yang ada. Sebab spirit posdaya adalah mempertemukan dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dari bayi, anak, remaja, dewasa, lansia dan disabilitas, sehingga tidak ada satu wargapun yang tertinggal.

Deputi Bidang Kewirausahaan Dr. Mazwar Nurdin dan Ketua LP2M UIN Malang memimpin OST Posdaya Masjid

KOPRI

Bab VII
DAMPAK KKM TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI

Posdaya yang dirancang, dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disiapkan berdampak pada perubahan sosial yang cukup signifikan. Dikalangan masyarakat perubahan ini mencakup; *Pertama*, munculnya kader-kader pendamping masyarakat di lingkungan masjid yang inspiratif, bisa menjadi motor penggerak perubahan, menguasai *problem solving* dan memberikan kontribusi ide-ide kreatif yang diperlukan masyarakat; *Kedua,* berkembangnya modal sosial berbasis masjid yang selama ini kurang produktif menjadi subur untuk memperkuat tim kader posdaya; *Ketiga*, menguatnya jejaring antar jama'ah dan antar posdaya maupun pihak-pihak terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga program yang direncanakan menjadi lebih mudah direalisasikan.

Bagi mahasiswa program KKM tematik posdaya berbasis masjid ini memberikan nilai plus sebab mereka belajar bersama masyarakat dengan tema dan arah pengabdian yang jelas dan kegiatan-kegiatannya telah dikolaborasikan dengan program pembangunan pedesaan untuk percepatan capain indikator MDGs sehingga mahasiswa mendapat pengalaman *problem solving* yang lebih luas dan beragam. Bagi dosen, pengabdian bersama dengan mahasiswa lebih efektif. Dosen sebagai pembimbing lapangan bukan hanya mengontrol kinerja mahasiswa KKM tetapi dosen, mahasiswa dan masyarakat dapat belajar bersama, menganalisis masalah, mencari solusi dan mengambil keputusan bersama serta mengeksekusi hasil keputusan juga bersama-sama. Pengalaman dan penyerapan fakta lapangan ini sangat bermanfaat bagi dosen untuk memperkaya khazanah dan menghidupkan diskusi di dalam kelas ketika mengajar. Posdaya berbasis masjid yang telah berhasil digunakan sebagai tujuan *observation study tour* (OST) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, para pejabat, pimpinan lembaga sosial dan keagamaan, organisasi sosial dan berbagai kalangan yang konsen untuk pemberdayaan masyarakat. Kunjungan ini tidak hanya berdampak pada pengunjung tetapi juga memberikan spirit kepada posdaya semakin percaya diri, bersemangat dan terus mengalir dengan kreativitas dan inovasinya dalam mengembangkan posdaya.

Bab VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masjid sebagai pusat pemberdayaan umat telah dipahami oleh sebagaian besar umat Islam, namun dalam implementasinya masih mengalami tarik ulur antara masjid sebagai medan ritual dengan tugas pemberdayaan umat sebagai medan budaya di luar peran masjid. Kondisi saat ini, mayoritas masjid masih kehilangan peran, fungsi dan kebermaknaannya mengantarkan umat Islam dalam mencapai kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Masjid masih dikonsepkan sebagai ruang isolasi bagi mereka yang ingin meraih kesucian dan derajat yang tinggi (*maqoman mahmuda*) hanya dengan ibadah murni, padahal sejalan dengan itu peran dan tanggung jawab sosial sebagai ibadah kemanusiaan merupakan sisi lain yang memiliki nilai yang sama pentingnya .
2. Strategi posdaya masjid dalam pemberdayaan umat antara lain: Posdaya merupakan gerakan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Gerakan ini bersifat partisipatif-emansipatoris, bergerak dengan modal sosial, kearifan

dan potensi lokal, perspektif pengembangan memperkuat fungsi masjid dalam pencapaian indikator MDGs. Menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan, memperkuat dengan berjejaring berbagai komponen masyarakat, dan dapat diukur dengan indikator lokal mapun global.

3. Sistem posdaya masjid ditinjau dari teori strukturasi adalah masjid dan jama'ahnya merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat, posdaya berbasis masjid tidak membiarkan jama'ahnya tertinggal dari yang lain, seluruh jama'ah kader posdaya memiliki kontribusi dalam berbagai bentuknya sesuai dengan potensi dan kompetensinya masing-masing. Perubahan tersebut dilakukan dengan berbagai cara pendataan keluarga untuk mengetahui peta keluarga untuk lelang kepedulian terhadap situasi umum masyarakat sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pemberdayaan, menggali potensi, memberikan perhatian khusus terhadap keluarga miskin sebagai dampak kultural maupun strutural, memfasilitasi dan memediasi kebutuhan kader posdaya dengan pihak-pihak terkait agar mereka dapat mengakses sumber daya yang diperlukan.

B. Saran-saran

Diperlukan revitalisasi peran dan fungsi masjid dengan varian sistem yang digunakan. Sistem pemberdayaan masjid melalui posdaya dengan beberapa keunggulannya merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang diharapkan mampu mengantarkan muslim Indonesia menghadapi tantangan modernisasi dan persaingan global. Untuk itu saran penulis adalah:

1. Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI), para takmir masjid memaknai masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat sebagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah.

2. Masjid telah menjadi ruang pemberdayaan umat yang sifatnya lokal perlu diatur melalui regulasi agar ada kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung sarana dan prasarana tidak hanya pembangunan masjid, tetapi juga pengembangan SDM jama'ah untuk pengentasan kemiskinan.
3. Perlu adanya dukungan masyarakat secara luas untuk mendiseminasikan posdaya berbasis masjid sebagai akselarasi program pengentasan kemiskinan dalam berbagai bidang, dan mengingkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Diharapkan komitmen yang kokoh dan berkelanjutan bagi semua *stakeholders* terkait dengan pengembangan posdaya agar pembangunan berbasis partisipatif dan berkelanjutan ini menjadi solusi atas problem sosial di masyarakat.

Para relawan Posdaya Masjid UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PIMPINAN CABANG

FATAYAT

NAHDLATUL ULAMA

KOTA MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qusyairi, Abu Husain, TT, *Shahih Muslim* Juz 1, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy.

Beilharz, Peter, 2005, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Terjemah: Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2012, *Ketetapan-Ketetapan Muktamar* VI DMI.

Elfindri dan Aristo Munandar, 2009, *Makmur Bersama Masjid Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani*, Baduose Media.

Gazalba, Sidi, 1989, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam,* Jakarta, Pustaka Alhusna.

Giddens, Anthony dan Jonathan Turner, 2008, *Sosial Theory Today,* Terjemah: Yudi Santoso Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik Posdaya Berbasis Masjid 2015.*

Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001 Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan.

Mansur, Amril, *Masjid dan Transformasi Sosial Etis:Upaya Pemberdayaan Masjid dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Innovation, Vol. IX, No. 1, Januari-Juni 2010

Mardikanto, Totok, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan Corporate Social Responsibility,* Surakarta: UNS Press.

Mufidah Ch & M. Mahpur, 2012, *Posdaya Berbasis Masjid Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat,* Malang, LPM UIN Maliki Malang.

Mufidah Ch, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Posdaya Berbasis Masjid,* Jakarta, PT Citra Kharisma Bunda.

Rifa'i, A. Bachrundan Moch Fakhruroji, 2005, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid,* Bandung: Benang Merah Press.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemah: Alimandan, Jakarta: Kencana.

Sarwono, Ahmad, 2003, *Masjid Jantung Masyarakat,* Yogyakarta, Izzan Pustaka.

Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Pos Pemberdayaan Keluarga*, Jakarta, PT Citra Kharisma Bunda.

……, 2011, *Kumpulan Peraturan Pemerintah Sebagai Dasar Pelaksanaan Posdaya,* Jakarta, Yayasan Damandiri.

……, *Memotong Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

……, 2015, *Panduan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Melalui Posdaya dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan,* Jakarta: Yayasan Damandiri.

Utomo, Dwidjo, 2015, *Posdaya Disabilitas,* Jakarta: Yayasan Damandiri,

Wrihatnolo Andy R., Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat,* Jakarta: PT. Gramedia.

Website:

Kusumosubroto, Susilo, *Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Strategi Advokasi*, Http/doc.google.com. Diakses, 19 September 2014.

Jusuf Kala: *Perbandingan Jumlah Masjid dan Umat Islam Masih Sedikit* www.dakwatuna.com/2013/03/28966. Diakses 19 Maret 2015.

Hasil Riset 89,9 Persen Masjid Sepi, www.bersamadakwah.com. Diakses 20 Maret 2013.

Jogokariyan : Masjid yang hidup!, Jurnal Irsyad, 17 Februari 2015,

Situspembelajar.blogspot.com. Diakses 21 Maret 2015.

MUSLIMAT

نهضة العلماء

N U

HIDMAT MNU

Mufidah Cholil

Prof. Dr. Mufidah Cholil, M.Ag adalah guru besar Sosiologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 September 1960.

Terkait KUPI ia berpandangan bahwa keberadaan KUPI sangat penting dalam pengarusutamaan gerakan keadilan gender di Indonesia. Komponen KUPI yang diisi oleh individu dan lembaga dari berbagai latar belakang pemikiran dan keahlian menjadikan gerakan ini dapat diterima di masyarakat. Mufidah tidak bisa menghadiri KUPI, namun ia mengutus beberapa kadernya untuk berpartisipasi di dalamnya. Ia juga mengaku terus mengikuti perkembangan KUPI pasca acara melalui grup Whatsapp. Tak hanya tentang KUPI, melalui grup tersebut ia sering mendapatkan inspirasi, saran, dan ide-ide baru yang sangat bermanfaat bagi dirinya sebagai dosen dan pegiat keadilan gender.

KUPI dalam konteks kaderisasi ulama dan aktivis yang concern pada isu perempuan menurut Mufidah sangat bagus, terutama untuk mempersiapkan pengganti beberapa aktivis yang sudah memasuki usia sepuh dan uzur.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M. Ag

Tempat, Tgl. Lahir	Bojonegoro, 10 September 1960
Aktivitas Utama	▪ Guru Besar Sosiologi Hukum Islam UIN Maulana Malik ibrahim Malang
Karya Utama	▪ Paradigma Gender

Sebagai dosen dan akademisi, ia menceritakan bahwa dalam perkuliahan gender yang ia asuh setiap semester, ia selalu memasukkan KUPI sebagai salah satu bahan kuliah untuk mahasiswanya. Kepentingan utamanya adalah ia sedang mempromosikan KUPI dan segenap programnya hingga ke garis bawah akademik, yaitu mahasiswa.

Daftar isi

Riwayat Hidup

Tokoh dan Keulamaan Perempuan

Penghargaan dan Prestasi

Karya-Karya

Riwayat Hidup

Mufidah menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Baureno, Bojonegoro, tahun 1971, Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro, tahun 1974, PGA Empat Tahun di Malang, tahun 1975, dan PGAN Enam Tahun Puteri, tahun 1977.

Selanjutnya ia menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Pendidikan Agama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang, dan selesai tahun 1985, program Pascasarjana di UNISMA Malang, dan selesai tahun 2001, dan terakhir pendidikan S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel di Surabaya, lulus pada tahun 2009.

Ia menikah dengan Dr. HM. Ilyas Thohari, M. Pd dan hingga hari ini dikarunia empat orang anak dan empat orang cucu. Kegiatan dan aktivitas utamanya adalah sebagai pengajar di beberapa kampus di Kota Malang, seperti UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Malang, Universitas Brawijaya pada Program Pascasarjana Studi Kajian Gender dan menjadi dosen luar biasa di Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Selama karier akademiknya, ia memangku beberapa jabatan strategis, antara lain sebagai Ketua unit Kewirausahaan Stain Malang, tahun 1998-2000; Ketua Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang, tahun 2000-2007; Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2007-2009; Konsultan Konsultasi Keluarga sakinah (BK2S) Fakultas Syariah UIN Malang, tahun 2007-sekarang; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013-2017; Anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018-Sekarang.

Selain berkiprah di ruang-ruang akademik, ia juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya adalah sebagai Wakil Direktur Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang, tahun 2004-2009; Anggota Pokja Pengarusutamaan Gender Dinas Pendidikan Prop. Jatim, tahun 2003-2013; Anggota Tim Ahli Lakpesdam NU Kota Malang, tahun 2012-2017; Tim Ahli Pengurus Cabang Ikatan Sarjana NU Kota Malang dan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana NU Prov. Jawa Timur, tahun 2018 – 2023; Anggota Dewan Pembina Pesantren Rakyat, tahun 2009-Sekarang; Pendiri Forum Pengembangan Masjid dan Masyarakat “Lingkar Masjid”; Pembina Yayasan Taman Pendidikan Islam Darul Ulum Baureno, Bojonegoro, tahun 2005 – sekarang; Founder dan Pengasuh Women Leadership Center (WLC) “El-Shavia” Malang, tahun 2019- sekarang.

Tokoh dan Keulamaan Perempuan

Awal mula perjumpaan Mufidah dengan wacana-wacana gender adalah sebelum ia aktif di Pusat Studi Gender UIN Malang, tepatnya sebelum tahun 1990-an. Tahun-tahun itu, diskursus dan kajian gender sudah mulai digaungkan di beberapa perguruan tinggi Islam. Prof. Zaitunah Subhan adalah salah satu tokoh utama pengusungnya di Jawa Timur.

Pada tahun 1997, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendirikan pusat Studi Wanita yang kemudian berubah menjadi Pusat Studi Gender yang dipimpin sendiri oleh Mufidah. Namun demikian, jauh sebelum itu, Mufidah sudah dikenal sebagai pengusung isu-isu gender. Ia bersentuhan dengan tema pemberdayaan perempuan sejak menjadi mahasiswi, berlanjut ketika menjadi dosen dan menjadi matang dengan dunia aktivisme.

Ia benar-benar mengusung wacana kesetaraan gender ke akar rumput tepatnya ketika paska tahun 2000 turun INPRES tentang Pengarusutamaan Gender. Ia menjadi bagian dari tim sosialisasi di daerah Jawa Timur. Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur, ia turun langsung ke berbagai kota di Jawa Timur. Kemudian ia juga terlibat secara penuh dalam sosialisasi langsung tentang isu kekerasan pada perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak dan banyak isu yang terkait perempuan dan anak.

Dalam pandangan Mufidah, perkuliahan studi gender yang ia asuh juga memasukkan beberapa feminis Muslim Indonesia, misalnya Kiai Husein Muhammad dan Faqih Abdul Kodir dengan Tafsir Mubadalah-nya. Ia merasa senang sebab tema-tema tersebut bukan hanya sebagai bahan kuliah, melainkan tema-tema itu menjadi tema tugas akhir mahasiswa di berbagai tingkatan, baik skripsi,

tesis, maupun disertasi. “Ini tadi siang saya menguji salah satu tesis yang membahas Mubadalah-nya Kiai Faqih,” ujar Bu Mufidah sambil tertawa senang.

Tidak hanya dalam dunia akademik, Mufidah juga kerap memberi pendampingan kepada beberapa korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Bahkan ia mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang *concern* mengurusi persoalan itu. Ketika pendirian lembaga itu, ia pernah minta izin kepada Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sewaktu masih menjadi Presiden Indonesia. “Saya baru saja, sebelum wawancara dengan Anda menerima konsultasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga,” tutur Mufidah.

Dalam aspek yang lebih luas, Mufidah juga aktif dalam program Posdaya berbasis mesjid. Sebuah program yang kemudian diadopsi banyak perguruan tinggi negeri dan swasta di beberapa daerah di Indonesia. Sisi menarik dari program ini adalah bahwa masjid yang selama ini dikenal sebagai “milik” laki-laki kemudian juga memberi ruang kepada perempuan untuk berkecimpung mengurusi secara sentral urusan mesjid.

“Mesjid itu tidak hanya milik laki-laki dan diurus laki-laki tetapi ia juga milik perempuan dan bisa diurus perempuan. Memang azan, iqamah, dan beberapa hal lain adalah ranah laki-laki tetapi itu sifatnya sebentar, mungkin beberapa menit, nah saya tidak mau ambil bagian yang sebentar itu, tetapi saya ingin ambil bagian yang lebih luas, yaitu kesejahteraan mesjid melalui program posdaya berbasis mesjid yang saya promosikan ini,” jelasnya panjang lebar ketika penulis “pancing” soal ketelibatannya dalam program posdaya berbasis mesjid.

Memang harus diakui, seperti diakui sendiri oleh Mufidah, bahwa pengarusutamaan kesetaraan gender di Indonesia kerap menemukan batu sandungan bahkan bisa disebut masih menimbulkan kontroversi. Menurut Mufidah, masih banyak kekhawatiran dan ketakukan atas wacana ini. Penyebabnya seperti, *pertama*, kepentingan untuk mempertahankan status quo sebagai bagian dari manifestasi budaya patriarkhi; *kedua*, masih kuatnya pemahaman tekstual karena teks dipandang tidak memiliki problem penafsiran; *ketiga*, penolakan terhadap budaya Barat yang dipandang sebagai jahiliyah modern yang mengusung isu kesetaraan gender pada masyarakat Muslim.

Merespons orang yang kerap menolak wacana ini, sikap yang dipilih Mufidah adalah rendah hati atau dalam bahasa agama tawadhu. Ia menuturkan, ia berusaha semaksimal mungkin menghindari debat kusir yang bisa menyebabkan permusuhan makin tajam. Keluar dari itu, ia memilih tawadhu sembari mendoakan agar wacana yang ia usung mengandung manfaat.

Ke depan ia berharap semua yang kiranya bermanfaat terkait wacana kesetaraan gender harus terus dilanjutkan, apa pun hambatannya. Pengarusutamaan kesetaraan gender harus melibatkan semua aspek, bukan hanya dari aspek intelektual melainkan juga dari hati dan perasaan. Lebih-lebih untuk situasi sekarang pada saat hambatannya semakin kompleks. Selain itu, mengingat perkembangan dunia digital, kampanye-kampanye kesetaraan gender juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Misalnya, membuat konten-konten yang cerdas dan bermafaat tentang kesetaraan gender.

Karya-Karya

Di tengah kesibukannya di dunia akademik dan aktivisme, Mufidah masih menyisihkan waktu untuk menulis. Di antara karya-karya yang ditulisnya adalah:

Tahun	Judul Buku	Penerbit
2004	Paradigma Gender	Malang: Bayu Media, ISBN: 979-3323-40-X
2006,	Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan	Yogyakarta: Pilar Media
2007	Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Indonesia Australia Partnership in Basic Education (IAPBE)
2008	Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender	Malang :UIN Press, ISBN: 978-602-958-430-1
2009.	Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial	Malang: UIN Press, ISBN: 978-602-958-265-9
2010	Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam (Editor)	Kementerian Agama-MCPM AIBEP
2010.	Gender di Tengah Pergulatan Tradisi:Telah Perempuan di Antara Ketegangan Pemikiran dan Tradisi Nahdliyin, dalam: Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama.	Malang: Pustaka Iqitshod
2010	Gender di Pesantren Salafi Why Not?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri.	Malang: UIN Press, ISBN: 978-602-958-265-6
2010	Isu-isu Gender Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer (Editor)	Malang: UIN Maliki Press, ISBN 978-602-958-325-0
2011	Mengapa Mereka Diperdagangkan: Membongkar Kejahatan Trafiking	Malang: UIN Maliki Press, ISBN 978-602-958-352-6
2011	Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posdaya Berbasis Masjid	Malang: UIN Maliki Press
2012	Ketika Perempuan Berteologi: Kekuatan Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Antar Umat Beragama Perspektif Psikologi	Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, ISBN978-979-8361-67-8
2012	Profil Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012	Badan PP dan KB Kab. Bojonegoro-LPM UIN Malang.
2013	Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013	Malang: UIN Maliki Press, ISBN
2014	Menjadi Sejahtera dan Mandiri Bersama Posdaya Masjid	Malang: UIN Maliki Press, ISBN 978-602-1190-32-6
2014	Integrasi Kesetaraan Gender Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dalam Program Posdaya Berbasis Masjid, Dalam: International Seminar Proceeding Contemporary Islamic Law in Asia	ISBN 978-602-958-483-7
2014	Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender	Malang :UIN Press, ISBN: 978-602-958-430-1
2015	Revitalisasi Fungsi Masjid Melalui Posdaya Perspektif Teori Stukturasi.	UIN-Maliki Press
2018	Membangun Peradaban Menuju Kejayaan Indonesia: Peran Unisma Malang Perspektif Cendekiawan Muslim	Intelegensia Media: ISBN: 978-602-5562-47-1

Pada sekala Internasional, pada tahun 2004 ia juga pernah berkunjung ke China dalam rangka menghadiri konferensi internasional bertajuk “Asian Women’s/Gender Studies and Education Practice in the New Millennium”. Dalam forum ini ia mempresentasikan makalah yang berjudul, “Women and Fundamentalism in Islam”. Pada kesempatan lain ia juga pernah berkunjung ke Brisbane Australia dalam forum “Asia Pasific Interfaith Symposium: Women, Faith and Culture of Peace” pada tahun 2008.

Penulis : **Ahmad Husain Fahasbu**
Editor : **Nor Ismah**
Reviewer : **Faqihuddin Abdul Kodir**

Diperoleh dari "https://kupipedia.id/index.php?title=Mufidah_Cholil&oldid=3288"

Halaman ini terakhir diubah pada 14 Februari 2022, pukul 12.22.

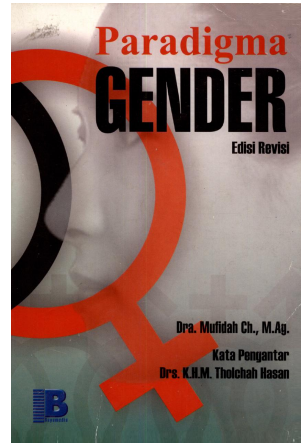

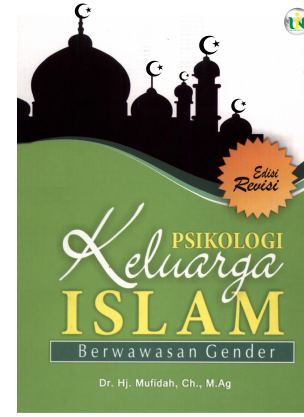

madza media

MUFIDAH SANG PENGKADER

Dr. Mohammad Mahpur |
Dr. Si Luh Nyoman Seriadi S.Pd., S.Ag., M.Pd.|
Noor Jehhan|Sigit Priatmoko
|Erfaniyah Zuhriyah, M.H.|
Miftahus Sholehudin|
Moh. Nur Hassan|
Nur Ariyanti|Amrullah AM|
Siti Fatimah|Febry Azka Nadia
|Muallifah|
Anissia Lailatul Fitri
|Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd.
|Abdullah Sam.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Haryono Suyono
(Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
أُولُو الْأَلْبَابِ
MALANG

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015